



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
REPUBLIK INDONESIA

LOGISTICS

2024

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II



Direktorat Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS



KATA PENGANTAR

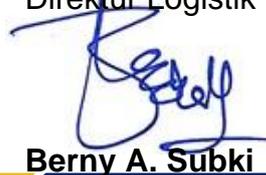
Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 yaitu Kinerja Logistik Ikan Nasional adalah (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan II sebesar 101,76.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 19 Juli 2024

Direktur Logistik



Berny A. Subki

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Logistik

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Logistik

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP, dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor), Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit), Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data), Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit), Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), Sarana

distribusi logistik produk KP (MP Korporasi), Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit), Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit), Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai), Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%), dan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%). Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga), Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan), Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan), Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga), Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%), dan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) dan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I adalah sebesar 101,76 Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan II. Adapun rincian capaian periode Triwulan I yaitu sebagai berikut :

- IKK Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga); target 2 Lembaga; capaian 2 Lembaga atau 100% dari target;
- IKK Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan); target 2 Rekomendasi Kebijakan; capaian 2 Rekomendasi Kebijakan atau 100% dari target;
- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 5 Kesepakatan; capaian 7 Kesepakatan atau 140% dari target;

- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 125 Orang; capaian 125 Orang atau 100% dari target;
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target indeks 79,63; capaian indeks 106,17 atau 112,32% dari target
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 88,64 sebesar 110,8 % dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 120% dari target.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan pagu revisi menjadi 45.921.100.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 3.571.877.297,- atau sebesar 7,78% dari pagu revisi.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan II Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	3
1.5 Permasalahan Utama	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Sasaran Kegiatan	6
2.1.2 Kebijakan	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik	81
IV. Penutup	83
4.1. Kesimpulan	83
V. Lampiran	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	3
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan II Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku	10
Gambar 3.	Pembahasan KAK dan RAB Pengembangan STELINA	17
Gambar 4.	Rapat Pembahasan Substansi Perubahan Regulasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)	20
Gambar 5.	Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	22
Gambar 6.	Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	23
Gambar 7.	Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (Warehouse Management System/WMS)	25
Gambar 8.	Pelaksanaan Input KUSUKA Data Coldstorage	27
Gambar 9.	Kegiatan Kunjungan Lapang Verifikasi Data Profil Gudang Beku/Cold Storage (CS) di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	30
Gambar 10.	Rapat dalam rangka Pembahasan Outline Regulasi Penataan Logistik Nasional	33
Gambar 11.	Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024	35

Gambar 12.	Kegiatan dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP	37
Gambar 13.	Rapat Pembahasan Regulasi Penataan Logistik Nasional	38
Gambar 14.	Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Komoditas Perikanan untuk Umpan dan Bahan Baku Pemindangan	42
Gambar 15.	Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024	46
Gambar 16.	Rapat Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024	47
Gambar 17.	Rapat Pembahasan Template panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik, Jakarta 2 April 2024	52
Gambar 18.	Identifikasi Kapal Pengangkut Hasil Perikanan di Pelabuhan Bajomulyo –Juwana Pati dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pelaku Pengadaan Hasil Perikanan	53
Gambar 19.	Kunjungan lapang dalam rangka brainstorming pengelolaan CS swasta di Muara Baru, Jakarta Utara	55
Gambar 20.	Kunjungan ASHRAE Indonesia Chapter	57
Gambar 21.	Verifikasi Lapangan Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari	58
Gambar 22.	Rapat Penyusunan Juknis BP GBP dan KR	59
Gambar 23.	Rapat Reviu Desain dan analisa kelayakan usaha	60
Gambar 24.	Survey Karoseri Box Pendingin di PT. Bengawan Karya Sakti	62

Gambar 25.	Survey Karoseri Box Pendingin di CV.Delima Mandiri	64
Gambar 26.	Kegiatan sosialisasi implementasi SRG di Surabaya	67
Gambar 27.	Kegiatan sosialisasi implementasi SRG di Pati	69
Gambar 28.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pengadaan Hasil Perikanan	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik	8
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan II Tahun 2024	11
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	14
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	15
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	26
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	31
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	43
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	48
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	56
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	61
Tabel 11.	Target dan capaian IK 9	63
Tabel 12.	Target dan capaian IK 10	65
Tabel 13.	Target dan capaian IK 11	70
Tabel 14.	Target dan capaian IK 12	72
Tabel 15.	Target dan capaian IK 13	73
Tabel 16.	Target dan capaian IK 14	74
Tabel 17.	Target dan capaian IK 15	75
Tabel 18.	Target dan capaian IK 16	76
Tabel 19.	Target dan capaian IK 17	77
Tabel 20.	Target dan capaian IK 18	78
Tabel 21.	Target dan capaian IK 19	78
Tabel 22.	Target dan capaian IK 20	82
Tabel 23.	Target dan capaian IK 21	82
Tabel 24.	Target dan capaian IK 22	83
Tabel 25.	Realisasi anggaran Direktorat Logistik	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diamanatkan.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi lingkup Direktorat Logistik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

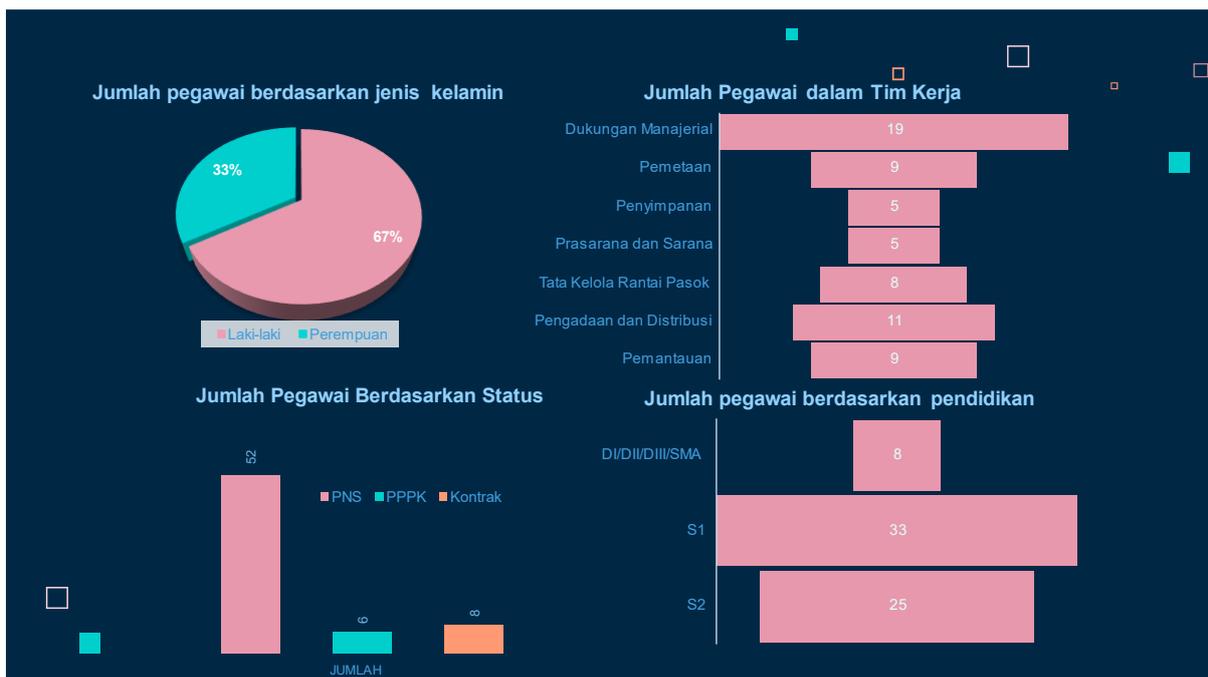
1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;

6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan II Tahun 2024, Direktorat Logistik memiliki total 66 pegawai, terdiri dari 44 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 52 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 25 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 19 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 11 orang, Timja Pemetaan dan Timja Pemantauan masing-masing memiliki 9 orang, dan Timja Tata Kelola Rantai Pasok serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 8 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Mismatch Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan II Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI

Kedaulatan (Sovereignty):

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keberlanjutan (Sustainability):

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

Kesejahteraan (Prosperity):

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2024 mempunyai 16 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya

Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBK Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP; dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan pagu revisi menjadi 45.921.100.000..

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10
11.	Terfasilitasinya Lembaga	11.	Lembaga Pengelola Kapal	8

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan		Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBPN Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

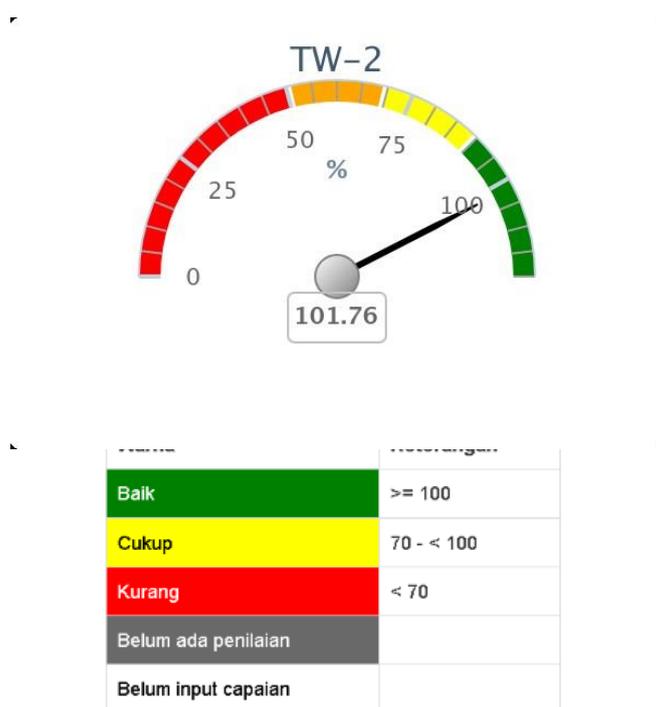
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2024 memiliki 22 indikator kinerja yang terdiri dari rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari April sampai dengan Juni 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan II sebesar 112,5. Adanya peningkatan 3,91 poin atau 3,6% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 11,15 poin atau 11% dari capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023.



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan II Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW II 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW II 2024		Tahun 2024	TW II 2024
1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor)	5	-	-	-	-
2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1	-	-	-	-
3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4	-	-	-	-
4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8	2	-	25	-
5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5	-	-	-	-
6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29	10	10	41,66	100
7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15	-	-	-	-
8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5	-	-	-	-
9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5	-	-	-	-
10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10	5	5	50	50
11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8	2	2	25	100
12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4	-	-	-	-
13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	287	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW II 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW II 2024		Tahun 2024	TW II 2024
	yang disediakan (Unit)					
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100	125	125	11,36	100
15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06	-	-	-	-
16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87	75	79,63	91,52	106,17
17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84	-	-	-	-
18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100	-	-	-	-
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80	80	88,64	110,8	110,8
20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	141,48	141,48
21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80	-	-	-	-
22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95	-	-	-	-

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola. Dalam matrik renaksi, pagu IKK ini sebesar Rp50.000.000,-. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Koridor Kendari – Surabaya/ Jakarta;
- 2) Koridor Makassar – Surabaya/ Jakarta;
- 3) Koridor Bitung – Surabaya/ Jakarta;
- 4) Koridor Ambon – Surabaya/ Jakarta;
- 5) Koridor Mimika – Surabaya /Jakarta.

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan II. Bentuk pengelolaannya adalah pelaksanaan kegiatan pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan pada koridor logistik.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

3.2.2. Sasaran Kegiatan “Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Ketertelusuran dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan. Target indikator tahun 2024 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan. Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir, dan target tercapai pada Triwulan IV.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan II. target tahun 2024 yaitu 1 unit Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan.

Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.237.500.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp79.783.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II. Adanya anggaran bertagging PNBPNP sebesar Rp693.909.000,-, dan belum adanya capaian PNBPNP lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNBPNP belum dapat digunakan . Adapun

realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp257.578.130,- atau sebesar 11,51% dari pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan KAK dan RAB Pengembangan STELINA

Pembahasan KAK dan RAB Pengembangan STELINA pada tanggal 19 April 2024 di RR. Karagenan, GMB III, Lantai 14 KKP. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Pemantauan, dan dihadiri oleh perwakilan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen KKP, Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana, Penanggung Jawab Lingkup Timja Pemantuan, serta Pelaksana Tim Kerja Pemantauan, Direktorat Logistik.

Tujuan dari rapat ini adalah untuk mendapatkan masukan mengenai KAK Pengembangan aplikasi STELINA. Dalam rapat ini secara umum diperoleh informasi dari pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Tujuan pengembangan aplikasi STELINA adalah terbangunnya aplikasi STELINA yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan.
- b. Target dari pengembangan aplikasi STELINA ini adalah tersedianya aplikasi STELINA yang menyediakan modul-modul dan menu untuk pengumpulan, proses, analisis dan menyajikan data ketertelusuran dan logistik ikan nasional sehingga memudahkan pelaku usaha melakukan implementasi STELINA, dan Pemerintah melakukan rekapitulasi dan analisis data ketertelusuran dan logistik ikan nasional.
- c. Terdapat masukan dalam rapat ini antara lain sebagai berikut:
 - Perlunya adanya tim teknis yang terdiri dari tenaga ahli untuk mendampingi proses penyusunan KAK RAB dan proses pengembangan aplikasi Stelina.
 - Dimungkinkan mekanisme pembayaran menggunakan sistem termin.
 - Perlu pencantuman klausul garansi dan maintenance aplikasi Stelina setelah berakhirnya masa kontrak.
 - Dalam implementasi Stelina, perlu adanya surat antar eselon I sebagai dasar resmi permintaan interkoneksi aplikasi di lingkup KKP.
 - Ruang lingkup pada pengembangan aplikasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi pengulangan terhadap pengembangan aplikasi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
 - Perlu dilakukan pendetailan pada Rancangan Anggaran Biaya berdasarkan klasifikasi personal dan non personal dengan memperhatikan standar biaya dari Inkindo.
 - Perlu dilakukan perbaikan pada aplikasi SIRUP.
- d. Dari hasil rapat ini akan dilakukan perbaikan kembali pada KAK dan RAB pengembangan aplikasi STELINA.
- e.

Dokumentasi



Gambar 3. Pembahasan KAK dan RAB Pengembangan STELINA

2. Rapat Pembahasan Substansi Perubahan Regulasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)

Dilaksanakan Rapat Pembahasan Substansi Perubahan Regulasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) pada tanggal 22 Mei 2024, dipimpin oleh Direktur Logistik dengan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, Sekretariat BPPMHKP, Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Pusat Pengendalian Mutu, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pengembangan Usaha, dan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik. Rapat ini bertujuan untuk pengkayaan substansi pada draft perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.

Substansi perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan definisi pada Ketentuan Umum : Perizinan Berusaha, Distribusi Ikan, Penipuan Hasil Perikanan (*Seafood Fraud*), Penangkapan Ikan Terukur
- b. Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan akan diperkaya dengan substansi sebagai berikut:
 - memantau ketersediaan stok ikan (jenis, volume dan harga).
 - memastikan ketertelusuran Bahan Baku bukan berasal dari penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan/atau pembudidayaan ikan yang tidak berkelanjutan.
 - melindungi konsumen dari penipuan Hasil Perikanan (*Seafood fraud*).
 - memantau konektivitas ekosistem logistik ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien.

- menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari potensi kontaminasi di seluruh rantai pasok.
 - membantu proses penarikan produk lebih cepat saat diperlukan.
- c. Kewajiban penerapan Stelina Bagi Pelaku Usaha (Pemasar Ikan dan Pengolah ikan), dengan kemudahan bagi pelaku usaha skala mikro diberlakukan secara sederhana setiap 3 bulan sekali dengan menginput paling sedikit asal ikan, volume, jenis ikan.
 - d. Mampu menerapkan ketertelusuran minimal pada satu tahap sebelumnya dan satu tahap sesudahnya dalam rantai pasok (one step back, one step forward).
 - e. Setiap Pengolah Ikan dan Pemasar ikan yang terlibat, saling terhubung aliran fisik produk dengan aliran informasi produk (interkoneksi) dan mencegah putusya rantai pasok.
 - f. Penambahan Cara Distribusi Ikan yang Baik pada kegiatan penanganan atau/atau pengolahan.
 - g. Pemenuhan Mutu di hulu dan pada penanganan dan/atau pengolahan melalui S-CPIB, S-CBIB, SPDI, SKP, HACCP (interkoneksi)
 - h. Ketertelusuran Eksternal terhadap sumber/asal bahan baku harus mampu mengidentifikasi setiap data dan informasi paling sedikit memuat: nama dan alamat Pemasok (Pemasar Ikan/Pengolah Ikan), jenis dan volume ikan, harga ikan, nama kapal, jenis alat tangkap yang digunakan, waktu dan lokasi pendaratan, nama pemilik kapal dan/atau nama pembudidaya, area penangkapan dan/atau lokasi budidaya, tanggal penerimaan melalui penginputan data/interkoneksi, termasuk tambahan data pemasok BTP, bahan pangan lainnya dan bahan kemasan/label.
 - i. Ketertelusuran Eksternal terhadap pemasaran/distribusi produk: lokasi distribusi nomor batch produk atau kode identifikasi lainnya; lokasi pengiriman, penerima; harga per unit produk, tanggal transaksi, volume yang dikirim.
 - j. Pemasar Ikan dan Pengolah Ikan harus bisa mengidentifikasi seluruh pemasok dan pembeli/buyer dan menghindari putusya rantai pasok.
 - k. Pemasar Ikan dan Pengolah Ikan harus bisa memverifikasi rekaman data dan informasi ketertelusuran dalam aplikasi Stelina.
 - l. Komitmen oleh Pelaku Usaha dengan menetapkan Tim Manajemen penanggungjawab Stelina dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.
 - m. Data dan informasi ketertelusuran harus selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diminta oleh Otoritas Kompeten Bidang Mutu dan Bidang lainnya.
 - n. Interkoneksi dengan sistem yang ada di lingkungan KKP perizinan, logbook, Pendaratan, CPIB, e-PIT, WMS, SHTI, CBIB, Neraca Komoditas Perikanan, Cara Distribusi Ikan yang Baik, SKP, HACCP.
 - o. Interkoneksi dengan sistem di K/L terkait atau pihak lain.

- p. Stelina diterapkan pada semua jenis hasil perikanan termasuk calon induk, induk, Mutiara, inti Mutiara, ikan hias, ikan hidup.
- q. Logistik Ikan Nasional : Penyimpanan di CS dan gudang penyimpanan, stok hasil perikanan (stok bahan baku, stok produk), stok dipantau setiap bulan oleh Dirjen.
- r. Transportasi : kereta api, pesawat udara penumpang, pesawat udara kargo.
- s. Distribusi dilaksanakan menjamin ketersediaan Hasil Perikanan ke seluruh NKRI dalam memenuhi konsumsi dan kebutuhan UPI dengan jumlah yang cukup, bermutu, aman, beragam, terjangkau dan tertelusur.
- t. Pelaksanaan Stelina: pencantuman alamat resmi Stelina, klausul registrasi dapat dilakukan dengan NIK, input data wajib dilakukan secara berkala dan konsisten dilakukan minimal setiap bulan.
- u. Pembuatan Bab tersendiri mengenai implementasi Stelina oleh Pemasar Ikan.
- v. Pembuatan Bab tersendiri mengenai implementasi Stelina oleh Pengolah Ikan
- w. Monitoring dan Evaluasi: dilakukan Dirjen secara berkala untuk mengukur keefektifan dan kesesuaian data yang diinput, Tim yang ditunjuk Dirjen, kunjungan lapangan ke lokasi, ketidaksesuaian dilakukan pembinaan, laporan movev dan laporan Stelina dilaporkan oleh Tim ke Dirjen sebagai bahan pembinaan ketertelusuran dan pertimbangan penyusunan kebijakan.
- x. Penerapan Sanksi administrasi berupa:
- Peringatan/teguran tertulis.
 - Rekomendasi Penundaan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
 - Peringatan/teguran tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan:
 - Peringatan/teguran tertulis pertama dikenai dalam jangka waktu 3 bulan.
 - Peringatan/teguran tertulis kedua dikenai dalam jangka waktu 2 bulan.
 - Peringatan/teguran tertulis ketiga dikenai dalam jangka waktu 1 bulan.
- y. Pembinaan oleh Direktur Jenderal berupa:
- Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka penerapan Stelina.
 - Edukasi.
 - Fasilitasi.
 - Integrasi data dan informasi pasar.
 - Promosi dan akses pasar.

Masukan – masukan yang dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta rapat mendukung adanya perubahan Permen KP No 29 tahun 2021, terutama pada substansi mengenai kewajiban penerapan ketertelusuran pada Pemasar Ikan dan Pengolah Ikan.
- b. Perubahan Permen KP No 29 tahun 2021 telah masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sehingga terdapat tenggat waktu penyelesaian Draft Perubahan Permen KP tersebut pada akhir Juli 2024.
- c. Draft hasil pembahasan pada rapat ini telah disampaikan dari Direktorat Logistik ke Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Memorandum Nomor 677/DJPDSPKP. 3/PDS.110/V/2024.
- d. Akan dilaksanakan rapat pembahasan secara lebih detail yang akan diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP.

Dokumentasi



Gambar 4. Rapat Pembahasan Substansi Perubahan Regulasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina)

3. Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Sosialisasi Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) dilaksanakan di Kota Semarang pada tanggal 28 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-31 yang dipusatkan di Semarang.
- b. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan DKP Prov Jateng, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas

- Katolik Soegijapranata, dan Dharma Wanita DKP Prov Jateng dengan total peserta sebanyak 25 orang.
- c. Dalam kegiatan ini disampaikan materi mengenai latar belakang perlunya sertifikasi mengenai ketertelusuran ikan, prinsip standardisasi oleh MSC, dan Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan Nasional.
 - d. MSC merupakan organisasi nirlaba internasional yang membuat standardisasi mengenai sustainability dari produk perikanan.
 - e. Standardisasi oleh MSC terdiri dari dua hal, yaitu standaridisasi perikanan (di hulu), dan standardisasi *chain of custody* (di sepanjang rantai pasok).
 - f. Standardisasi perikanan oleh MSC meliputi:
 - Kesehatan stok ikan.
 - Dampak pada ekosistem.
 - Pengelolaan yang efektif.
 - g. Sedangkan standardisasi *chain of custody* MSC meliputi 5 prinsip sebagai berikut:
 - Bahan baku dari pemasok bersertifikat.
 - Diidentifikasi dengan jelas.
 - Dipisahkan dengan produk lain.
 - Dapat dilacak dan dicatat volumenya.
 - Sistem manajemen perusahaan terpenuhi.
 - h. Pelaku usaha yang telah memenuhi standar tersebut dapat mengajukan untuk diaudit oleh lembaga sertifikasi. Apabila telah memenuhi hasil audit dengan baik, maka perusahaan tersebut berhak untuk menggunakan ecolabel MSC pada kemasan produknya.
 - i. Pada kegiatan ini disampaikan juga mengenai Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Stelina merupakan sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
 - j. Dasar hukum Stelina adalah PP no 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, kemudian diturunkan dalam Permen KP No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.
 - k. Pelaku usaha pemasar dan pengolah ikan dapat melakukan registrasi pada Stelina di laman <https://stelina.kkp.go.id> menggunakan NIB, NIK, atau nomor KUSUKA.
 - l. Setelah teregistrasi dalam Stelina, pelaku usaha melakukan pengisian data pembelian bahan baku, pengolahan, dan penjualan produknya agar mendapatkan Laporan Stelina Pemasar maupun Laporan Stelina Pengolah sebagai bukti ketertelusuran produknya.

Dokumentasi



Gambar 5. Sosialisasi Sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA).

4. Evaluasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*)

Dilaksanakan rapat dalam rangka evaluasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System*) dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024. dengan hasil sebagai berikut :

- a. Evaluasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*) dibuka oleh Katimja Penyimpanan. Kegiatan evaluasi ini dihadiri Direktur PT Hima Wasesa Manunggal sebagai pengembang Aplikasi dan Anggota Tim Kerja Penyimpanan.
- b. WMS merupakan aplikasi yang dikembangkan Direktorat Logistik untuk dapat melakukan pemantauan data aktivitas keluar masuk ikan. Aplikasi ini saat ini masih digunakan oleh pelaku usaha penerima/pengelola CS BP. Beberapa pelaku usaha sudah memanfaatkan aplikasi ini dengan optimal sehingga ketika terdapat kendala maka langsung disampaikan ke KKP, berdasarkan masukan dari pengguna tersebut perlu ditindaklanjuti untuk kesempurnaan aplikasi.
- c. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait aplikasi adalah :
 - Adanya duplikasi data terinput bisa lebih dari 5 kali sedangkan jenis ikan dan tanggal penginputan data sama.
 - Terdapat selisih antara stok dari aplikasi user dengan hasil olehan database keluar masuk ikan.
 - Tenaga IT yang sebelumnya menangani WMS sudah resign sehingga untuk perbaikan tidak dapat langsung dilakukan, perlu dilakukan pembenahan secara mendetail ke dalam aplikasi tersebut

untuk diketahui dimana permasalahannya untuk selanjutnya dicari solusinya.

- Sebagai masukan dalam database yang ditarik oleh admin sebaiknya dapat menampilkan Provinsi, Kabupaten, Harga beli ikan, Harga jual ikan, Asal Ikan, dan Tujuan Distribusi.
- Tampilan beranda dapat berupa diagram keluar masuk ikan sehingga lebih menarik.
- Terkait keanehan data yang diinput di aplikasi WMS selain dilakukan perbaikan dari sisi aplikasi perlu dilakukan pengecekan juga dari sisi data yang masuk sehingga akan ditindaklanjuti dengan verifikasi data kepada para pelaku usaha.

Dokumentasi



Gambar 6 Sosialisasi Sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) & Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

5. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*)

Dilaksanakan rapat dalam rangka sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System*) dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 dan kunjungan lapang tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

- a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Penyimpanan, dihadiri oleh APHP Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, perwakilan Dinas yang terdapat Cold Storage Bantuan Pemerintah maupun Tugas Pembantuan, Perwakilan Seditjen PDSPKP, Timja lingkup Direktorat Logistik dan beberapa pelaku usaha cold storage di Provinsi Jawa Barat.

- b. Pelaku usaha yang hadir antara lain CS Karangsong Indramayu binaan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung (Koperasi Puskud Mina Laksana dan Poklahsar Kinar Djaya), Kabupaten Bogor (CV. Putri Dahlia, Cindy Grup, Koperasi Produsen Bahari Karya Utama, PT. Boxsea Sigma, UPI Pemindang Bapak Hj. Khodir), Kabupaten Karawang (Kelompok Pemindang Rian Putra), Kota Sukabumi (CV. Salungsung), Kabupaten Subang (PT. Sakana Umi Nusantara Bahari).
- c. Pelaksanaan sosialisasi difokuskan kepada pelaku usaha Cold Storage Bantuan Pemerintah, Cold Storage Tugas Pembantuan, penerima bantuan mobil berpendingin dan pengelola cold storage swasta penyedia bahan baku pengolahan (pindang, asap, dll) maupun untuk pasar domestik yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- d. Tujuan sosialisasi adalah:
- Mengajak pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan aplikasi WMS untuk mengelola arus keluar masuk barang dan stok, sehingga mempermudah dalam mengontrol stok ikan dalam CS.
 - Membuat jejaring bisnis antar pemilik Cold Storage, untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha wilayah yang sedang musim ikan, lokasi cold storage yang belum terisi penuh dan lain sebagainya.
- e. Setelah sosialisasi kegiatan dilanjutkan kunjungan lapang di beberapa CS di Kabupaten Bogor untuk membantu aktifasi WMS dan sekaligus memberikan pendampingan penginputan stock dan keluar masuk ikan. Beberapa CS yang dikunjungi meliputi :
- CS PIH Cimandala
PIH Cimandala dibangun tahun 2006, cold storage terpasang saat ini berkapasitas 15 ton dan ABF 1 ton. Mulai pertengahan Mei 2024 dikelola oleh PT. Boxsea Sigma (Suplayer ikan beku ke supermarket, sayur box dan beberapa restoran di Jabodetabek). Saat ini masih dalam proses penataan fasilitas yang ada. PT. Boxsea Sigma telah melakukan aktifasi WMS dan telah menginput stock ikan yang ada di CS. Saat ini stock ikan tuna 150 kg dan cumi-cumi 150 kg, dengan akupansi sebesar 2%.
 - PT. Cindy Group
Usaha Pemindangan PT.Cindy Group Indonesia Utama yang berlokasi di Kp. Tulang Kuning RT 02 RW 06 Desa Waru Kecamatan Parung ini sudah dirintis sejak Tahun 2003. Cold storage terpasang saat ini berkapasitas 100 ton, dengan akupansi sebesar 10%, rata-rata ikan keluar per hari sebesar 2 ton. Pasca Covid 19, Cindy Group masih berusaha untuk bangkit kembali, yang sebelumnya produksi mencapai

5 ton per hari. PT. Cindy Group telah melakukan aktifasi WMS dan telah menginput stock ikan yang ada di CS. Saat ini pengelolaan PT. Cindy Group akan merger menjadi Koperasi Produsen Bahari Karya Utama.

- CV. Putri Dahlia

CV. Putri Dahlia merupakan salah satu penyedia bahan baku pindang dan menyiapkan tempat pengolahannya di Kabupaten Bogor. Cold storage terpasang saat ini berkapasitas 45 ton, dengan akupansi sebesar 91%. Ikan keluar per hari rata-rata 3 – 4 ton. CV. Putri Dahlia telah melakukan aktifasi WMS dan telah menginput stock ikan yang ada di CS.

Dokumentasi



Gambar 7 Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*)

3.2.3. Sasaran Kegiatan “Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, pemetaan, dan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2024 adalah 4 (empat) data. Indikator ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum

dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan II.

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp318.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 360.924.776,- atau sebesar 36.09% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pelaksanaan Input KUSUKA Data Coldstorage

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat pelaksanaan Input KUSUKA data *Coldstorage* pada tanggal 29 April 2023 di Wisma Gracillaria, Ruang Rapat Lantai 2 Pulo Mas Utara I No.68, RT.7/RW.14, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, bersama ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

- a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan dihadiri oleh perwakilan Pusat data dan informasi, Setjen KKP, penanggung Jawab data, Seditjen PDSPKP; dan internal Kelompok Pemetaan.
- b. Tujuan dari pelaksanaan rapat dimaksud yaitu penginputan data pelaku usaha *cold storage* ke aplikasi kusuka sehingga enumerator didaerah dapat mengupdate data stok setiap bulan pelaku usaha dimaksud.

c. Point – point Rapat

- Terdapat 915 pelaku usaha cold storage yang belum masuk data KUSUKA .
- Setiap orang mendapatkan 83 pelaku usaha cold storage yang harus di input ke aplikasi KUSUKA.
- Proses input data pada aplikasi KUSUKA sampai ke sarana pelaku usaha, ussernam dan password.
- Hasil pendaftaran KUSUKA berupa nomor KUSUKA direkap pada daftar pembagian.
- Data yang sudah terinput sebanyak 146 pelaku usaha.

Dokumentasi



Gambar 8. Pelaksanaan Input KUSUKA Data Coldstorage

2. Kegiatan Kunjungan Lapang Verifikasi Data Profil Gudang Beku/Cold Storage (CS) di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan kegiatan ini untuk melakukan verifikasi data profil gudang beku/cold storage (CS) yang memiliki data pencilan di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kegiatan verifikasi lapangan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pemetaan pelaku usaha yang memiliki sarana Gudang Beku/Cold Storage. Direktorat Logistik telah menyusun database profil CS dengan jumlah total CS sebanyak 2.101 unit dengan tota 863,504 ton. Berdasarkan data tersebut masih terdapat data kapasitas CS anomali yaitu < 5 ton dan >10.000 ton. Sehubungan dengan hal tersebut kami melakukan diverifikasi terhadap profil CS pada wilayah binaan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Dari hasil koordinasi dengan Ibu Ade sebagai Kepala Bagian Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau bahwa berdasarkan data hasil validasi nasional profil CS semester 2 tahun 2023 untuk Provinsi Kep. Riau ditemui 12 data profil CS yang dinilai tidak wajar (anomaly) dengan kapasitas di bawah 5 ton. Terkait hal tersebut, Dit. Logistik telah bersurat ke Kepala Dinas Prov. Kepulauan Riau untuk memverifikasi kembali data tersebut per Februari 2024 tetapi belum mendapatkan tindak lanjut.

- c. 12 data profil CS anomali di Prov. Kep. Riau terdiri atas 6 CS di Kota Tanjungpinang dan 6 CS di Kab. Bintan, terverifikasi sbb :

Kota Tanjungpinang

2 pelaku usaha yaitu Toko Murni Baru dan Toko Sumber Bk Jaya tidak memiliki CS, tetapi memiliki ruang pendingin dengan suhu 4°C untuk menyimpan komoditas ikan kering/asin

- Toko Murni Baru
Nama pemilik robin tjoe beralamat Jl.Pelantar 1, Kel. Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan NIB 0220000562034, dan no KBLI 47249 (Perdagangan eceran makanan lainnya), Toko Murni Baru ini menjual berbagai macam jenis ikan kering yang berasal dari lokal dan tripang kering dari Belitung, untuk saat ini ikan kering kurang peminatnya sehingga ruang pendingin untuk menyimpan ika kering tidak digunakan secara optimal.
- Toko Sumber BK Jaya
Nama Pemilik Sugianto beralamat Jl.Pelantar 1 No 1-4, Kel Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan NIB 0220205311463, dan no KBLI 47215 (Perdagangan eceran hasil perikanan), Toko Sumber BK Jaya ini menjual berbagai jenis ikan kering dan kerupuk ikan dan yang diugunakan untuk menyimpan di ruang pendingin hanya ikan kering dan penjualan dilakukan setiap hari sehingga ruang pendingin tidak pernah kosong, pada saat ini ruang pendingin digunakan untuk menyimpan ikan kering kurang lebih 700-800 kg.
 - 1 pelaku usaha Hermanto (Ahung) memiliki CS tetapi tidak operasional.
 - 1 pelaku usaha yaitu Chang terkonfirmasi memiliki CS yang diperuntukkan untuk menyimpan es balok (bukan ikan).
 - 1 pelaku usaha yaitu Koei Ngo terkonfirmasi memiliki CS dengan kapasitas 3 ton yang diperuntukkan untuk

menyimpan bahan baku pengolahan bakso ikan. Usaha sudah terdaftar NIB 9120211121239 dengan KBLI 10216 (Industri berbasis daging olahan dan surimi), beralamat di Jl.Plantar 1 No 59, Kel. Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Piang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bakso ikan yaitu ikan gulama, laiko, ikan kaca, kerisi, jego, ikan pasir yang berasal dari lokal Tanjung Pinang, pengolahan bakso ikan saat ini lakukan sudah lebih modern dari sebelumnya hanya dengan cara manual, bahan baku ikan 300-400 kg diolah menjadi surimi disimpan dicold storage selama 4-5 hari baru diolah menjadi bakso ikan dengan penyimpanan hanya satu hari dan untuk pasarannya dijual untuk lokal saja.
- 1 pelaku usaha yaitu CV Sea Noble dengan nama pemilik Hendry Sim terkonfirmasi memiliki CS dengan kapasitas 15 ton dan ABF dengan kapasitas 4 ton. Beralamat Jl. Pelantar KUD 94-96 Kel. Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, memiliki NIB 9170200492129 dan KBLI 52102 (Aktivitas CS), 47215 (Perdagangan eceran) 03132 (Jasa produksi penangkapan ikan),10217 (Industri pendinginan/pengesan ikan). Kondisi CS saat ini sudah tidak bisa dioperasikan karena mesin rusak sehingga ikan disimpan di ABF. CV Sea Noble berusaha di bidang perdagangan sebagai suplier hotel. Stok per tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 1,2 ton. Ikan dominan yang disimpan yaitu kakap merah, tenggiri, selar, udang dan cumi yang kurang lebih 50 kilo/hari ikan dijual ke hotel.

Kabupaten Bintan

- 4 pelaku usaha yaitu Aliang, Laiman, Barek Betawi, Phang Akok terkonfirmasi terkonfirmasi memiliki CS yang diperuntukkan untuk menyimpan es balok (bukan ikan).
- 1 pelaku usaha yaitu Lim Sun Tie terkonfirmasi memiliki CS tetapi tidak operasional.
- 1 pelaku usaha yaitu PT. Planet Golden Sea terkonfirmasi memiliki CS dengan kapasitas 3 ton. Status operasional CS sangat bergantung dengan pasokan musim ikan. Saat ini kondisi stok ikan di CS tersebut sedang kosong.

Dilaksanakan koordinasi penerapan penarikan PNBP pasca produksi di PP Kijang Bintan. PP Kijang Bintan hanya memiliki 1 orang petugas pencatat pendaratan ikan (petugas PIPP) yang tidak stand by di pelabuhan. Kedatangan petugas PIPP hanya apabila ada ikan yang didaratkan (on call) dari pelaku usaha. Hal ini karena masih sedikit ikan yang didaratkan di pelabuhan serta waktu pendaratan yang rata-rata dilaksanakan di luar jam kerja. Berdasarkan informasi dari kepala UPTD Perikanan Kab. Bintan, proses bisnis pendaratan ikan di PP Kijang Bintan belum berjalan sebagaimana konsep PIT. Umumnya nelayan sudah memiliki titik-titik pendaratannya sendiri dan bermitra dengan pengumpul (tokek), tokek tersebut yang kemudian akan menghubungi petugas PIPP Ketika ada bongkar/pendaratan. Adanya jeda waktu antara kedatangan ikan dan kedatangan petugas menyebabkan peluang besar loss PNBP. Kapal yang beroperasi terdiri atas kapal berukuran 5-6 GT dan ukuran 10 GT. Komoditas utama hasil tangkapan PP Kijang Bintan yaitu kurisi, kerapu, baronang (libam), bawal dan ekor kuning (emoi-emoi). Pihak syahbandar menyampaikan bahwa HAI yang saat ini berlaku sudah sesuai.

Dokumentasi



Gambar 9. Kegiatan Kunjungan Lapangan Verifikasi Data Profil Gudang Beku/Cold Storage (CS) di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

3.2.4. Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik ikan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional perlu

dilakukan pengembangan kelembagaan distribusi ikan meliputi : pembentukan kelompok kerja SLIN maupun penguatan peran Pelaku Usaha.

Kelompok Kerja SLIN terdiri dari Pusat (KKP) dan Daerah yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan melibatkan pelaku usaha. Kelompok Kerja daerah/Lembaga pengelola daerah yang difasilitasi sebanyak 7 lembaga yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah ada capaian 2 lembaga di Triwulan II.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina	2	-	-	8	2	-	-	2	100	25	200	200

Berdasarkan tabel 6. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) pada Triwulan 2 adalah 2 Lembaga. Capaian ini setara dengan 110% terhadap target Triwulan II tahun 2024 yakni 2 Lembaga. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah 200% terdapat persamaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2023. adapun capaian 2 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Jawa Timur

2. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp340.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 314.643.465,- atau sebesar 31,46% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Rapat dalam rangka Pembahasan Outline Regulasi Penataan Logistik Nasional.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, di RR. Direktur Logistik Lantai 12, GMB 3-KKP, dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP, telah dilaksanakan rapat penyiapan data dukung penetapan koridor SLIN Biak-Surabaya. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dengan narasumber Bapak Kuncoro Harto Widodo (Praktisi Universitas Gadjah Mada) serta dihadiri oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, Katimja Pengadaan dan Distribusi, serta perwakilan dari Tim Kerja: Pemetaan, Penyimpanan, Pemantauan, serta Prasarana dan Sarana. Hasil rapat disampaikan sebagai berikut:

1. Saat ini, regulasi tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diatur melalui Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik, dan Permen KP nomor 58 tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.
2. Dalam pelaksanaannya, implementasi Permen KP 58/2021 dirasa kurang optimal dalam menjawab persoalan-persoalan terkait logistic ikan nasional terutama disebabkan oleh masih terjadi tumpang tindih Program/Kegiatan dan Regulasi/kewenangan antar K/L, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berimbas pada inefisiensi pengelolaan logistic dan tingginya biaya logistic termasuk untuk komoditas ikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi pengaturan logistic ikan nasional melalui peraturan yang lebih tinggi. Regulasi yang diusulkan akan memperhatikan penataan logistic ikan nasional yang melibatkan multi pihak, multi sektor, multi stakeholder, serta multi komoditas.
3. Pada tahun 2025, Direktorat Logistik berencana mengajukan regulasi penguatan logistic produk KP melalui:

- a. Perpres Logistik Ikan Nasional yang akan diimplementasikan secara nasional dengan melibatkan semua pihak terkait;
 - b. Perpres penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri yang akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses distribusi ikan dengan biaya yang efisien.
4. Terkait pengajuan Perpres SLIN, rapat pada hari ini diharapkan memberikan masukan dari Koordinator Hukum perihal penyusunan outline Perpres SLIN. Diskusi dalam pertemuan ini juga diharapkan memberikan masukan rujukan pertauran yang dapat digunakan untuk memperkaya outline Perpres dimaksud. Selanjutnya, outline akan dibahas Bersama dengan Tim Hukum PDS dan lingkup Direktorat Logistik.

Dokumentasi



Gambar 10. Rapat dalam rangka Pembahasan Outline Regulasi Penataan Logistik Nasional

2. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

Dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP, telah dilaksanakan rapat penyiapan data dukung penetapan koridor SLIN Biak-Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 April 2024. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dengan narasumber Bapak Alan F. Koropitan, (Kantor Staf Presiden) serta dihadiri oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, Katimja Pengadaan dan Distribusi, serta perwakilan dari Tim Kerja: Pemetaan, Penyimpanan, Pemantauan, serta Prasarana dan Sarana.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain:

1. Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/4526/PW.11.01/4/2023 tanggal 28 April 2023 kepada Presiden hal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan ini menyampaikan bahwa menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

2. Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pemerintah Pusat diamanatkan untuk mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.
3. Sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Kepmen KP nomor 155 tahun 2023, diperlukan penetapan kembali Pokja SLIN Pusat untuk masa kerja berikutnya.
4. Adapun pasal tentang Kelompok Kerja SLIN Pusat tetap diamanatkan dalam Pasal 7 PERMEN KP nomor 58 tahun 2021 tentang SLIN, khususnya terkait pengembangan kelembagaan distribusi ikan. Anggota Kelompok Kerja SLIN Pusat terdiri atas perwakilan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Selain amanat membentuk Kelompok Kerja SLIN Pusat dalam pelaksanaan SLIN diamanatkan pula pembentukan Kelompok Kerja SLIN Provinsi. Pembentukan kelompok kerja SLIN yang saat ini disiapkan, meliputi 7 Provinsi yang merupakan koridor logistik, yaitu Daerah Khusus Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
6. Pelaksanaan SLIN untuk pengembangan kelembagaan distribusi ikan salah satunya dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja SLIN Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan uraian tugas sebagaimana terlampir:

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA SLIN PUSAT

(sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, pasal 8 ayat 1)

- a. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional;
- b. Mengoordinasikan implementasi SLIN di tingkat nasional;

- c. Merumuskan permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap rencana distribusi ikan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional;
- e. Mengoordinasikan penyusunan peta ketersediaan ikan dan neraca komoditas perikanan; dan
- f. Mengoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh hasil perikanan.

Dokumentasi



Gambar 11. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

3. Kegiatan dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Perpres SLIN

Dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Perpres SLIN yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 April 2024. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Tata Kelola, Direktorat Logistik dengan narasumber Ibu/Bapak Fungsional Utama dan Madya lingkup Dit. Logistik serta dihadiri oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, Katimja Pengadaan dan Distribusi, serta perwakilan dari Tim Kerja: Pemetaan, Penyimpanan, Pemantauan, serta Prasarana dan Sarana.

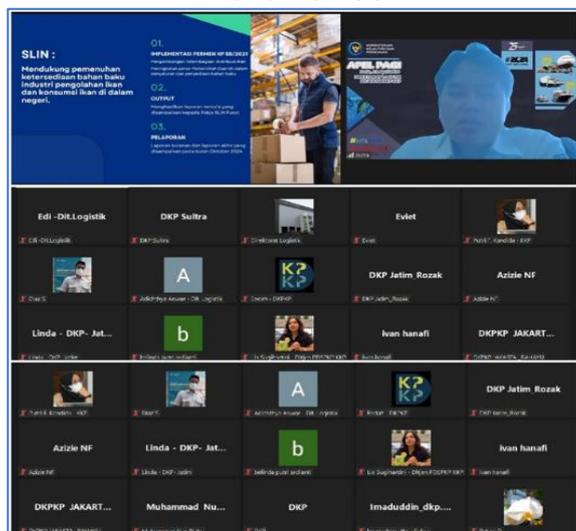
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain:

- 1. Sosialisasi Pembentukan Pokja SLIN Provinsi sebagai amanat Pasal 7 ayat 2b Permen KP no.58 Tahun 2021 dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok Hasil Perikanan dan dihadiri

Perwakilan Dinas KP Provinsi Jawa Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan DKPKP Provinsi DKI Jakarta, Katimja Pengadaan dan Distribusi, Pemantauan dan Perwakilan Timja Penyimpanan.

2. Pembentukan POKJA SLIN merupakan amanat PermenKP no.58/2021 dalam pengembangan kelembagaan distribusi ikan dan peningkatan peran pemerintah Daerah dalam penyaluran dan penyediaan bahan baku
3. Pokok- Pokok Diskusi:
 - a. Mengacu pada Permen KP 58/2021, tugas Pokja SLIN Provinsi adalah:
 - Merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi;
 - Mengoordinasikan implementasi SLIN di tingkat provinsi dan implementasi SLIN antar kabupaten/kota;
 - Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi;
 - Memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan di tingkat provinsi;
 - Mengoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan di tingkat provinsi; dan
 - Mengoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh Hasil Perikanan yang terjadi di daerah.
 - b. Target lokasi pembentukan Pokja SLIN tahun 2024 ada 8, 1 Pusat dan 7 Provinsi; yaitu: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Timur.
 - c. Pokja SLIN Provinsi ini diharapkan menjadi wadah untuk konsolidasi, koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan SLIN dari hulu hingga ke hilir, sehingga susunan anggota Pokja SLIN Provinsi seyogyanya terdiri atas:
 - Perwakilan Dinas KP Provinsi;
 - Enumerator IKLI;
 - Perwakilan Asosiasi;
 - Perwakilan Pelaku Usaha;
 - Sesuai amanat Permen KP 58/2021, SK Pokja SLIN Provinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pada pelaksanaannya dapat menyesuaikan, mempertimbangkan kewenangan PJ Kepala Daerah dan kendala teknis yang dihadapi. Sekiranya ada kendala lain yang ditemui, maka dapat di tetapkan oleh Kepala Dinas KP Provinsi atas nama Gubernur/Kepala Daerah.

Dokumentasi



Gambar 12. Kegiatan dalam rangka pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP

4. Rapat Pembahasan Regulasi Penataan Logistik Nasional.

Dalam rangka menindaklanjuti diskusi hulu hilir perikanan tangkap yang diselenggarakan pada Kamis, 25 April 2024 di Semarang, maka dilakukan pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih detail yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2024. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Logistik serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Asosiasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Mina Lestari, KUD Misoyo Mardi Mino Sarang, HNSI Kabupaten Rembang, Paguyuban Nelayan Dampo Awang Rembang, PT. Indo Sea Food Rembang, PT. Naga Laut Timur Rembang, CV. Mutiara Laut, PT. Sari Samudera Indonesia, Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, Katimja Pengadaan dan Distribusi, serta perwakilan dari Tim Kerja: Pemetaan, Penyimpanan, Pemantauan, serta Prasarana dan Sarana.

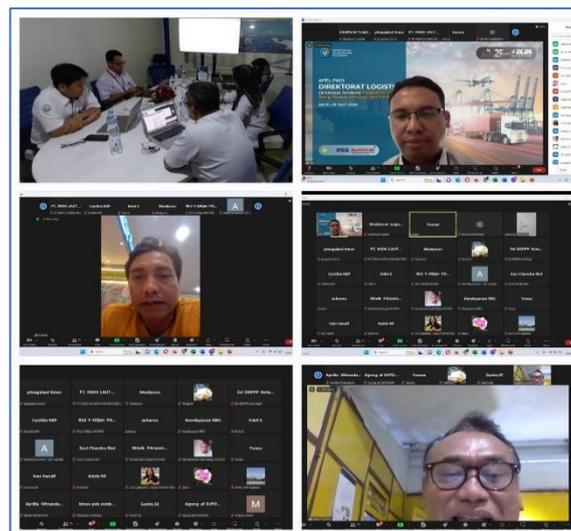
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain:

- 1) Pak Susanto (Pelaku usaha Tegal) menyampaikan bahwa hasil tangkapan ikan dan cumi, tingkat harganya relatif rendah, dan berpotensi dapat

dinaikkan lagi. Sehingga pelaku usaha memerlukan *buyer* lebih banyak dan *offtaker* yang lebih bervariasi agar dapat memberikan tingkat harga yang lebih tinggi. Pembeli lokal yang membeli umumnya bagian marketing namun *buyer* berasal dari China untuk dikumpulkan kemudian diekspor. Pembelian produk umumnya tidak menggunakan perjanjian tertulis.

- 2) Pembentukan POKJA SLIN merupakan amanat PermenKP no.58/2021 dalam pengembangan kelembagaan distribusi ikan dan peningkatan peran pemerintah Daerah dalam penyaluran dan penyediaan bahan baku
- 3) Perwakilan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari menyampaikan bahwa lazim terjadi di PP Tegalsari, saat hasil tangkapan melimpah harga ikan akan turun, mengingat banyak nelayan yang melakukan bongkar muatan. Jenis ikan yang banyak didaratkan di tegal adalah cumi, sotong dan kurisi (sebagai bahan baku surimi).

Dokumentasi



Gambar 13. Rapat Pembahasan Regulasi Penataan Logistik Nasional

5. Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Komoditas Perikanan untuk Umpan dan Bahan Baku Pemindangan.

Pertemuan dilaksanakan tanggal 13 Mei 2024, secara *hybrid* secara luring di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor dan daring melalui aplikasi zoom meeting, dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, dengan Narasumber adalah Dr. Purwanto, selaku tenaga ahli, serta mengundang *stakeholder* terkait, antara lain: Badan Pusat Statistik, Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemasaran, Asosisasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik;

1. Tujuan pertemuan hari ini adalah pengumpulan data dan informasi pasokan dan kebutuhan ikan untuk usaha horekapasmod;
2. Bisnis makanan dan minuman di berbagai belahan dunia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, termasuk di Indonesia. Kesibukan masyarakat terutama di kota-kota besar, mendorong percepatan pertumbuhan bisnis makanan. Keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat dalam mempersiapkan makanan, mengubah perilaku masyarakat untuk makan di luar rumah seperti di restoran. Oleh karena itu salah satu industri perikanan yang perlu dijaga pasokan bahan bakunya adalah hotel, restoran, katering dan pasar modern:
3. Meningkatnya bisnis hotel, restoran, katering dan pasar modern ini perlu didukung dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang cukup dan berkualitas, salah satunya adalah dari komoditas perikanan. Jenis komoditas perikanan yang dibutuhkan dalam bisnis horekapasmod sangat beragam, mulai dari jenis ikan bersirip, krustasea, cephalopoda, moluska, rumput laut dan lain-lain. Mulai yang ketersediaannya bisa didapatkan di Indonesia maupun yang tidak ada di dalam negeri;
4. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian pola kebutuhan dan ketersediaan komoditas perikanan untuk usaha hotel, restoran, katering dan pasar modern. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kemampuan suplai pasokan dalam negeri, sehingga apabila terjadi kekurangan pasokan dapat diambil langkah melalui pemasukan/importasi. Termasuk diantaranya untuk komoditas perikanan yang tidak terdapat di dalam negeri;
5. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pasokan komoditas perikanan untuk usaha hotel, restoran, katering dan pasar modern tahun 2025, serta alternatif dalam penyempurnaan tata kelola pemasukan komoditas perikanan untuk usaha hotel, restoran, katering dan pasar modern;
6. Perwakilan APJI menyampaikan: Merupakan distributor untuk end user. APJI meliputi catering keseluruhan, baik industry maupun konsumsi. Pada catering (industry dan wedding), penggunaan ikan cukup banyak, namun terbatas untuk ikan-ikan tertentu saja. Beberapa pabrik melarang penggunaan ikan tongkol. Jenis ikan yang dipakai: salem, Kembung (setiap hari), *kembung layang*, *kembung mata belok*, Size 1.10, salem size 1.10, kakap merah atau putih (yang murah), mujair (size 11 atau 12 karena dilebarkan), nila, bandeng, lele, ekor kuning size 6 (dipotong 2), cumi, udang vaname (harga 80rb) size 40an, dengan penggunaan tiap hari. Menu harian: ayam, ikan, dan telur (harus ada), sedangkan daging seminggu 2x, atau di rotasi dengan udang atau cumi (2x seminggu). Untuk catering wedding, pasti menggunakan kakap atau gurami. Gurame juga

- setara daging. Penggunaan ikan kakap besar. Tapi untuk ikan kembung, tidak semua pabrik masuk. Produksi: selain catering, juga ada pendukungnya, yaitu industry bumbu. Pasokan ikan untuk catering umumnya dari Juwana Pati. Layang, kembung, perkak, kemarin (ikan banyar kecil), salem. Gayaman 85% pindang, sisanya ke pasar becek
7. Perwakilan APRINDO menyampaikan: ke 5%. Setiap hari ada penjualan. Tapi belum mengetahui berapa kebutuhan pastinya. Alfamart, indomaret, superindo, hypermart, Ramayana groceries, tip top, yogya supermarket, untuk data lengkapnya, akan disampaikan menyusul. Jenis ikan: berbagai ikan air tawar, mujair, nila gurami, patin, mas, udang,
 8. Perwakilan BPS menyampaikan: focus ke harga konsumen. Sebagian sampel data harga di pasar tradisional. Inflasi yang terjadi di 2 bulan terakhir inflasi di Maret dan April. Komoditas ikan yang menyumbang andil terhadap inflasi antara lain: ikan lele nila, mujair, dan ikan mas. Komoditas lain ada, tapi tidak terlalu signifikan dalam menyumbang inflasi. Untuk data lain, ada di Direktorat Neraca BPS;
 9. Perwakilan Pusdatin menyampaikan siap mensupport data. Pusdatin dapat data dari BPS< tapi tidak bisa diakses secara umum, kecuali data publish saja;
 10. Perwakilan DJPT menyampaikan: Data 2021-2023, mohon memastikan lebih spesifik data yang diminta, misalnya: jenis ikan apa, dari wilayah mana, dll. Untuk tahun 2023, masih proses validasi, dan datanya masih berbintang. Untuk data salem tidak ada data penangkapan, yang ada ikan sunglir yang merupakan hasil tangkapan. Permintaan data dapat langsung disampaikan ke DJPT. 2023 belum bisa disampaikan yang publish, karena baru mau publish mulai besok. Kebutuhan bahan baku ikan dapat disebutkan detail jenis ikan apa saja. Terkait PIT tahun 2023, data yang masuk sudah cukup banyak ke Dit Kepelabuhanan Perikanan karena data disana sdh *real time*. Sebaiknya disebutkan detail jenis ikan dan wilayahnya;
 11. Perwakilan DJPB menyampaikan: mengapa ikan air tawar menjadi penyumbang inflasi di daerah-daerah tertentu. Panen nila salin seminggu yang lalu di Karawang diharapkan dapat mengurangi inflasi. Perlu dianalisis lebih lanjut penyebab inflasi akibat dari ikan air tawar. Terkait data, data sementara TW 1 2023 dan 2024, yang turun hanya ikan kerapu. Data DJPB sudah dapat diakses langsung. UPT Budidaya murni hanya untuk diseminasi dan modelling saja. Data murni dihimpun dari enumerator dan penyuluh. Data statistic DJPB dapat diakses di Pusdatin KKP. Data produksi bandeng 5 tahun kedepan akan disusun melalui renstra. Untuk proyeksi produksi tahun 2025, DJPB sdh membuat s.d 2030. Dengan demikian dapat dihitung proyeksi produksi dari DJPB. Proyeksi tahunan 5 tahun kedepan ada 2,9% per tahun untuk bandeng;
 12. Perwakilan Ditsar: menghitung serapan ikan di luar rumah tangga. Kebutuhan dihitung berdasarkan data BPS, data bpenghitungan bahan

- pangan pokok 2017-2021. Tahun 2024, ikan tdk masuk di kajian Bapok BPS. Pendataan ikan untuk Horeka, jawaban BPS tidak bisa mendata ikan, demikian juga di Bapanas, ikan tidak masuk di kajian Bapoknya;
13. Perwakilan Setditjen menyampaikan bahwa saat ini belum memiliki data horeka dan pasmod. Berapa anggotanya, berapa kebutuhannya;
 14. Perwakilan APJI menyampaikan akan menyampaikan data rekap anggotanya;
 15. Praktisi - Pak Pur: menyampaikan data impor time series dapat diolah dengan dukungan data-data tambahan lain seperti GDP, dll;
 16. Perwakilan Timja Pemetaan: Data Pasmod belum ada kebutuhan dan pasokannya. Umumnya kebutuhan dan pasokan ikan untuk ritel relative sama dari satu ritel dengan ritel lainnya. Kebutuhan data melalui BPS, memang dapat mengajukan permintaan ke BPS melalui surat;
 17. Perwakilan Timja Pemantauan: Volume penjualan di Superindo Semarang, seminggu hanya 20 kg. Stok ikan 68 ton;
 18. Perwakilan APJI menyampaikan bahwa umumnya catering memasok kebutuhannya melalui Lotte, dan sudah memiliki member di lotte tsb. Umumnya, pelanggan terbesar lotte adalah catering dan resto. Bahkan pihak Lotte sering melakukan survey ke pelanggan2 restoran dan catering. Pihak Lotte sering memberikan potongan harga khusus apabila pelanggan membeli dengan volume lebih banyak. Pengusaha catering biasanya memasok ikan dari pasar muara angke dan Lotte. Untuk catering yang premium, maka catering akan memasok dari Lotte;
 19. Terkait kembang impor, Pelaku usaha tidak mengetahui beda antara kembang local dan impor. Catering lebih menggunakan cumi putih (cumi impor) karena harganya lebih murah. Anggota APJI sudah di seluruh Indonesia, 24 provinsi. Sebagian pelaku usaha kue, wedding, catering atau produsen makanan. Catering industry umumnya masuk di APJI. Contohnya catering ke Kalbe Group. Standar customer harus dipenuhi oleh catering, umumnya berbeda untuk tiap industry. Antara pabrik kertas, pabrik obat ataupun rumah sakit. APJI saat ini baru akan menyusun database untuk jumlah anggota masing-masing karegori, termasuk kebutuhan tiap komoditasnya. Nanti hasil penyusunan data base tersebut akan diinfokan ke Ditlog. Catering lebih suka belanja di Lotte, karena lebih praktis, lokasinya nyaman, bisa dibantu menyimpan di storage Lotte.

Dokumentasi



Gambar 14. Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Komoditas Perikanan untuk Umpan dan Bahan Baku Pemindangan

Sasaran Kegiatan “Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas”

Indikator Kinerja Kegiatan “Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)”

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Neraca Komoditas Perikanan merupakan data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk acuan teknis, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah terdapat capaian pada Triwulan II. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga

capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	2	-	-	5	2	-	-	2	100	40	200	200

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan) pada Triwulan II adalah 2 Rekomendasi Kebijakan. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target Triwulan II tahun 2024 yakni 2 Rekomendasi Kebijakan. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah 200% terdapat persamaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2023, Adapun 5 rekomendasi yang ditargetnya sebagai berikut :

1. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pelumatan tahun 2025
2. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku umpan tahun 2025
3. Analisis ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan untuk Horekapasmod dan pereduksian/bahan pengayaan makanan tahun 2025
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pemindangan tahun 2025
5. Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas tahun 2025

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp1.250.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp454.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 382.519.031,- atau sebesar 30,60% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024.

a. Rapat dilaksanakan secara hybrid, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2024, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Tata Niaga, dengan menghadirkan tenaga ahli Bapak Purwanto, serta perwakilan dari: Perwakilan Tim Kerja Pemantauan-Direktorat Logistik, Tim Kerja Pemetaan-Direktorat Logistik, Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi-Direktorat Logistik, Tim Kerja Prasarana dan Sarana-Direktorat Logistik Penanggung Jawab Tata Kelola, Penanggung Jawab Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Produk Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas serta Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok-Direktorat Logistik. Tujuan rapat adalah pembahasan rencana kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku umpan dan bahan baku pemindangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha pemindangan adalah sebagai berikut:

- Menganalisis pasokan ikan untuk bahan baku umpan dan usaha pemindangan;
- Menganalisis kebutuhan ikan untuk bahan baku umpan dan usaha pemindangan;
- Menganalisis proyeksi kebutuhan impor komoditas perikanan untuk umpan dan bahan baku umpan dan usaha pemindangan
- Menyusun model distribusi bahan baku pemindangan yang efisien;
- Menentukan kebijakan pengendalian impor bahan baku ikan untuk umpan dan usaha pemindangan.

2. Agenda Rapat :

- a. Pengumpulan data dan informasi pasokan dan kebutuhan ikan untuk bahan baku usaha pemindangan dan umpan, tanggal 24 April 2024;
- b. Penghitungan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pemindangan dan Umpan tahun 2025, tanggal 25 April 2024.

3. Pembahasan Rapat sebagai berikut:

- a. KKP berkomitmen dalam menjaga stabilisasi ketersediaan komoditas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri perikanan dalam negeri, dimana salah satunya adalah usaha pemindangan dan usaha penangkapan ikan. Kedua usaha tersebut memegang peranan strategis dalam pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan hulu dan hilir;
- b. Keberhasilan usaha penangkapan ikan, khususnya ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, salah satunya juga dipengaruhi oleh ketersediaan umpan. Umpan hidup yang sering digunakan oleh nelayan untuk penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah ikan pelagis kecil, diantaranya seperti ikan teri, layang, sarden, selar, kembung, dan lolosi. Kendala utama untuk umpan hidup ini adalah ketersediaannya pada waktu tertentu tidak dapat mencukupi dalam kegiatan penangkapan ikan, sehingga perlu mencari solusi untuk jenis umpan hidup alternatif bila waktu tertentu umpan sulit didapat atau stok tidak memadai;
- c. Sama halnya dengan usaha penangkapan. Penyediaan bahan baku pemindangan juga menghadapi tantangan dan permasalahan mengingat sebagian besar bahan baku tergantung pada produksi hasil tangkapan ikan pelagis yang cenderung dipengaruhi oleh pola musim penangkapan ikan;
- d. Dalam rangka menyusun strategi yang tepat untuk pemenuhan penyediaan pasokan umpan dan bahan baku usaha pemindangan, perlu dilakukan kajian pola ketersediaan dan kebutuhan bahan baku ikan untuk mengetahui kemampuan suplai pasokan ikan dalam negeri, sehingga apabila terjadi kekurangan pasokan dapat diambil langkah melalui pemasukan/importasi;
- e. Untuk itu, dipandang perlu untuk menyusun analisis kebutuhan dan ketersediaan umpan dan bahan baku usaha pemindangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pasokan umpan dan bahan baku pemindangan tahun 2025, serta alternatif dalam

penyempurnaan tata kelola pemasukan umpan dan bahan baku pemindangan.

Dokumentasi



Gambar 15. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

2. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024.

- a. Rapat dilaksanakan secara hybrid, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2024, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Tata Niaga, dengan menghadirkan tenaga ahli Bapak Purwanto, serta perwakilan dari: Perwakilan Tim Kerja Pemantauan-Direktorat Logistik, Tim Kerja Pemetaan-Direktorat Logistik, Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi-Direktorat Logistik, Tim Kerja Prasarana dan Sarana-Direktorat Logistik Penanggung Jawab Tata Kelola, Penanggung Jawab Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Produk Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas serta Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok-Direktorat Logistik. Tujuan rapat adalah pembahasan rencana kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku umpan dan bahan baku pemindangan. Hasil rapat disampaikan sebagai berikut:
- b. Tujuan pelaksanaan kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha pemindangan adalah sebagai berikut:

- Menganalisis pasokan ikan untuk bahan baku umpan dan usaha pemindangan;
- Menganalisis kebutuhan ikan untuk bahan baku umpan dan usaha pemindangan;
- Menganalisis proyeksi kebutuhan impor komoditas perikanan untuk umpan dan bahan baku umpan dan usaha pemindangan;
- Menyusun model distribusi bahan baku pemindangan yang efisien;
- Menentukan kebijakan pengendalian impor bahan baku ikan untuk umpan dan usaha pemindangan.

c. Agenda pembahasan rapat:

Penghitungan estimasi kebutuhan bahan baku pemindangan serta proporsi bahan baku per komoditas.

d. Dilakukan perhitungan produksi perkomoditas berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan tangkap dari tahun 2018 – 2026

e. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan basis data 2017-2025, diproyeksikan untuk tahun 2025. Terlampir data penghitungan estimasi kebutuhan ketersediaan bahan baku pemindangan serta persentase realisasi impor, total alokasi impor sementara

Dokumentasi



Gambar 16. Rapat Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

3.2.5. Sasaran Kegiatan “Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)”

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Supplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan).

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, pada tahun 2023 indikator ini dibagi menjadi 2 IKK yaitu Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP dan IKK Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan. Sedangkan tahun 2024 IKK tersebut digabung satu yaitu Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan). Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan target sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 adalah sebesar 10 Kesepakatan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	5	5	17	29	5	7	19	12	100	41,38	-200	-1.400

Berdasarkan tabel 8. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) Capaian sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 12 Kesepakatan atau setara dengan 41,38% terhadap target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I terdapat penurunan capaian dengan target yang sama atau 28,57% Hal ini disebabkan adanya efektifitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pada Triwulan sebelumnya. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Twiwulan II tahun 2024 adalah -200% dan -1400% terhadap tingkat pertumbuhan pada Triwulan II tahun 2023. adanya penurunan anggaran dan blokir anggaran melalui *automatic adjustment* pada tahun 2024. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Adapun kesepakatan yang terbentuk sebagai berikut :

- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan Kurniawan Kasno dalam rangka Pengadaan
- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT Pindad International Logistik dalam rangka Distribusi
- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT SPIL Cab. Biak dalam rangka Distribusi

- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Damin) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Edi) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Nurjaman) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Simin Butolo) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dengan pagu awal sebesar Rp1.160.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp329.900.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 583.419.183,- atau sebesar 70,28% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pembahasan Template panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik, Jakarta 2 April 2024.

Rapat dilaksanakan secara offline yang dipimpin oleh Ketua Timja PD dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP, perwakilan Timja Hukum Setditjen PDSPKP dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik. Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan template panduan CDIB sesuai hasil pembahasan pada rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024

- 1) Template panduan CDIB akan disusun menjadi dua versi antara lain:
 - VERSI I : template panduan CDIB untuk pelaku usaha Distribusi yang tidak melakukan pengembangan HACCP
 - VERSI II : Template panduan CDIB untuk pelaku usaha yang melakukan pengembangan HACCP (untuk pelaku usaha Distribusi yang melakukan ekspor atau terintegrasi dengan UPI yang sudah menerapkan HACCP).
- 2) Template panduan CDIB Versi 1 terdiri dari :
 - Cover

- Profil unit usaha dan komitmen perusahaan terhadap mutu
 - Struktur Organisasi
 - Konstruksi Bangunan, Fasilitas dan atau Peralatan
 - Alur Proses Penanganan Pada Kegiatan Distribusi Ikan
 - Form penerapan CDIB yang meliputi standar higienis, standar teknik penanganan, standar pengemasan/pelabelan, standar peralatan (akan diisi oleh pelaku usaha Distribusi sesuai jenis usaha Distribusi Ikan yang dilakukan). Form ini terdiri dari Penerapan Standar, Prosedur/Cara penerapan, monitoring dan pencatatan.
- 3) Template panduan CDIB versi 1 dibuat secara simple dengan tetap menyesuaikan standar yg tertuang di dalam rancangan permen CDIB yg disusun. Selain itu, juga disesuaikan dengan parameter penilaian yang akan dilakukan oleh Tim pembinaan CDIB agar sinkron dengan kuesioner penilaian dan memudahkan pelaksanaan penilaian CDIB sebagai hasil dari pembinaan untuk dapat dilanjutkan proses sertifikasi SPDI di BPPMHKP.
- 4) Template panduan CDIB versi II untuk pengembangan HACCP disesuaikan dengan standar penerapan CDIB dan template di juknis CPIB di supplier yang saat ini sudah eksisting yang mengakomodir hasil temuan UE terkait penerapan Sisjamu yang dianggap belum dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir.
- 5) Adapun disampaikan bahwa untuk pengembangan HACCP pada penerapan CDIB dapat dilanjutkan dari template panduan CDIB versi 1 sehingga tidak berulang dalam penulisan substansi nya.
- 6) Template panduan CDIB versi II (pengembangan HACCP) antara lain:
- Menentukan Analisa Bahaya
 - Menentukan Critical Control Point (CCP)
 - Menentukan Critical Limit (Batas Limit)
 - Monitoring
 - Tindakan Koreksi
 - Record Keeping (Pencatatan)
 - Program Prasarat (Form Penerapan CDIB, Standar Sanitasi)
 - Traceability
 - Pelatihan Karyawan
- 7) Template Panduan CDIB versi II akan dibahas kembali secara detail dengan badan mutu

Dokumentasi



Gambar 17. Rapat Pembahasan Template panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik, Jakarta 2 April 2024

2. Identifikasi Kapal Pengangkut Hasil Perikanan di Pelabuhan Bajomulyo –Juwana Pati dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pelaku Pengadaan Hasil Perikanan, Pati 15-17 Mei 2024.

- a. Telah dilakukan Koordinasi terkait pengelola kapal pengangkut dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
 - Jumlah Kapal Pengangkut yang Memiliki ijin SIKPI 20 Kapal, dengan kepemilikan kapal Perusahaan dan Perorangan.
 - Kendala yang dihadapi adanya kenaikan harga solar dan cuaca yang tidak menentu.
 - Tindak lanjut yang diharapkan :kapal bisa menggunakan harga solar non industri.
 - Kapal angkut yang ada di Pelabuhan Bajomulyo beroperasi di laut lepas, Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Port to Port.
- b. Telah dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pengadaan Hasil Perikanan antara :
 - Kapal Pengangkut Mustika alam 01 dengan Kapal Penangkap Bintang Mas Terang.
 - Kapal Pengangkut Mustika alam 02 dengan Kapal Penangkap Bintang Mas Ekslusive.

 - Kapal Penangkap Bintang Mas Terang dengan Kapal Pengangkut Mustika Alam 02.
 - Kapal Penangkap Bintang Mas Ekslusive dengan Kapal Pengangkut Mustika Alam 01.

- c. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah :
- Menjamin keberlangsungan pengadaan ikan, distribusi dan transportasi hasil perikanan berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, keberlanjutan, adil dan saling menguntungkan.
 - Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok ikan.
 - Menerapkan sistem rantai dingin dalam rangka jamina mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dokumentasi



Gambar 18. Identifikasi Kapal Pengangkut Hasil Perikanan di Pelabuhan Bajomulyo –Juwana Pati dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pelaku Pengadaan Hasil Perikanan

3. Kunjungan lapang dalam rangka brainstorming pengelolaan CS swasta di Muara Baru, Jakarta Utara

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kunjungan lapang ke gudang beku swasta di Muara Baru pada tanggal 12 Juni 2024, bersama ini laporkan hal sebagai berikut:

- Kunjungan Lapang dipimpin oleh Katimja Penyimpanan beserta tim dan didampingi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Adapun gudang beku yang dikunjungi adalah PT. Benua Agri Sejahtera, PT. Lautan Bahari Sejahtera dan PT. Indomaguro Tunas Unggul.
- PT. Benua Agri Sejahtera beroperasi mulai tahun 2000, merupakan salah satu eksportir tuna terbesar tuna ke Amerika Serikat saat itu, namun karena adanya permasalahan ekspor tuna sehingga sempat menghentikan ekspor tuna ke Amerika Serikat. Saat ini sudah aktif Kembali ekspor tuna ke Amerika Serikat. Selain sebagai eksportir tuna, PT. Benua Agri Sejahtera juga menyewakan gudang beku ke beberapa mitra namun gudang bekunya belum Ber SKP. Saat ini ada

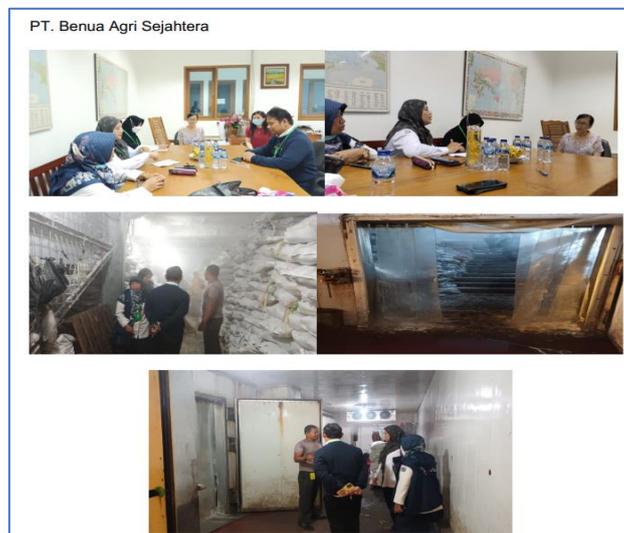
5 room gudang beku masing-masing berkapasitas 120 ton, sehingga total kapasitas 600 ton (suhu gudang beku dikisaran -200C). Setiap room ada 2 lantai, lantai 1 kapasitas 60 ton disewakan Rp 40 juta per bulan untuk lantai 2 kapasitas 60 ton disewakan Rp 25 juta per bulan. Room di lantai dua sewanya lebih murah karena untuk naik ke lantai 2 menggunakan tangga sehingga memerlukan tenaga bongkar lebih banyak, tidak memiliki forklift dan menggunakan palet dasar. Produk yang disimpan dikemas plastik, karton atau karung. Semua room sudah disewakan karena saat ini sedang musim ikan. Okupansi pada saat kunjungan di kisaran 80%. Jika ada room kosong juga melayani sewa harian minimal tiga hari dengan biaya sewa sebesar Rp 25 rupiah per hari. Jam kerja di PT Benua Agri Sejahtera pukul 08-16.00 WIB, libur di hari minggu dimana untuk teknisi dan satpam diberlakukan jam kerja shift. Untuk menambah pelayanan juga menyediakan jasa plugging dengan biaya Rp 400.000 per hari (24 jam).

- c. PT. Lautan Bahari Sejahtera memiliki gudang beku yang disewakan sebanyak 10 room berkapasitas masing-masing 100 ton dan 6 room berkapasitas masing-masing 1600 ton. Gudang beku yang disewakan pernah ber SKP namun tidak diperpanjang dikarenakan hasil pantauan tim SKP Dinas rekap suhu di data logger dibawah -180C. Biaya sewa kapasitas 100 ton sebesar Rp 42 juta per bulan , untuk gudang beku yang di lantai 2 kapasitas 100 ton biaya sewa Rp 32 juta per bulan. Untuk menambahkan pelayanan juga menyediakan jasa Plugging dengan biaya Rp 500 ribu per hari (24 jam). Jam kerja pukul 08.00-17.00 WIB dan hari minggu libur, jika ada lembur maka pegawai/tenaga kerja bongkar muat dibayar Rp 75.000 per jam yang ditanggung oleh mitra penyewa gudang beku. Saat ini PT. Lautan Bahari Sejahtera sudah mulai aktif melakukan ekspor tuna ke Amerika Serikat yang sebelumnya sempat berhenti semenjak ada permasalahan ekspor ke UE.
- d. PT. Indomaguro Tunas Unggul berdiri sejak tahun 1999 dan memiliki gudang beku untuk multi produk (ikan, daging sapi, olahan produk, daging ayam dan es krim) dan sudah Ber SKP. Selain menyewakan gudang beku juga melakukan ekspor ikan pedang (Meka dan Marlin) ke Portugal. Dalam mengelola Gudang beku, PT. Indomaguro Tunas Unggul telah menggunakan teknologi robotik buatan jepang sehingga tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak dan menerapkan Warehouse Management System. Di dalam gudang beku semua dioperasikan oleh robot sehingga terjadinya ikan tertukar atau stok berkurang bisa diminimalisir. Jumlah tenaga kerja untuk operasional Gudang beku 4-5 orang saja. Gudang beku yang dikelola memiliki tinggi 35 meter dengan sistem raking dan suhu -300C. Okupansi Gudang beku pada saat kunjungan sebesar 50% Dimana 10-20 %

digunakan untuk produk PT. Indomaguro Tunas Unggul. Saat ini ada 11.000 palet dasar yang disewakan, dengan biaya handling sebesar Rp 80.000 per palet (600-800 kg), untuk biaya sewa gudang beku sebesar Rp 16.000 per palet dengan minimal sewa 3 hari. Jam pelayanan di PT. Indomaguro Tunas Unggul jam 08.00 -16.00 WIB dan libur di hari Minggu.

Berdasarkan hasil kunjungan dapat disimpulkan bahwa tarif harga di beberapa gudang beku swasta di Muara Baru cukup beragam dimana mekanisme tarif yang diterapkan bisa per hari/ bulan dan per kg/room dengan biaya handling, dilakukan pemantauan suhu secara berkala, jam kerja operasional 7-8 jam dalam seminggu dengan libur di hari minggu kecuali untuk tenaga keamanan dan teknisi.

Dokumentasi



Gambar 19. Kunjungan lapang dalam rangka brainstorming pengelolaan CS swasta di Muara Baru, Jakarta Utara

3.2.6. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana penyimpanan produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2024 adalah 15 unit.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 15 unit Sarana penyimpanan produk KP yang disediakan.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit)	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 9 diatas belum ada capaian pada Triwulan II. Untuk mencapai Indikator Sarana Penyimpanan Produk KO yang Disediakan (Unit), dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp37.152.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp9.384.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.917.600.656,- atau sebesar 2,47% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti surat ASHRAE sebelumnya no. AIC/049/KKP-MB/III/2024 tentang Kunjungan fasilitas CS Muara Baru

Dalam rangka pengembangan standard sistem pendingin untuk cold storage yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pedoman para professional di bidang pendingin terutama cold storage di lingkungan anggota asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya,

ASHRAE Indonesia Chapter bermaksud melakukan kunjungan ke fasilitas cold storage yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu cold storage yang berlokasi di Muara Baru dengan kapasitas 2000 ton yang bertujuan untuk memberikan gambaran standard cold storage, juga

memahami tata kelola cold storage tersebut terutama dalam hal perawatan dan operasi mesin pendingin yang optimum.

Pendampingan kunjungan Asosiasi Pendingin ASHRAE Indonesia ke GB 2000 Ton Muara Baru, pada hari Senin 1 April 2024, dihadiri oleh Perwakilan ASHRAE, Timja Prasarana dan Sarana, dan Perwakilan Timja Penyimpanan Dit. Logistik

Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya :

- a. Kondisi Ruang Penyimpanan
- b. Kondisi dinding panel
- c. Kondisi mesin pendingin
- d. Kondisi ruang pengolahan dan ABF

Dokumentasi



Gambar 20. Kunjungan ASHRAE Indonesia Chapter

2. Verifikasi lapangan untuk pengusulan Gudang Beku Portabel dan Kendaraan berefrigerasi di Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari pada hari Jum'at 19 April 2024

- a. Pertemuan dihadiri oleh Katimja Prasarana, Pejabat Fungsional APHP Madya, dan jajaran pengurus Koperasi.
- b. Lokasi berada di Apartemen Pancoran Riverside, Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
- c. Koperasi Produsen SINERGI SANTO PINDANG JAYA BAHARI (Kop SINERGI) berdiri pada tahun 2022 dan merupakan perkumpulan usaha UMKM yang bergerak mulai dari Penangkapan Ikan, pengolah dan pemasaran produk perikanan tradisional pemindangan dan atau produk olahan perikanan (reseller). Pemberdayaan anggota SINERGI sebagai pemasaran produk perikanan dan atau produk olahan perikanan (reseller).

- d. Pelaku usaha yang bergabung dalam Koperasi SINERGI merupakan anggota Asosiasi Pindang Ikan Indonesia (APPIKANDO) dan Forum Pindang Ikan Nasional (FORPINAS).
- e. Kapasitas Gudang Beku Portabel yang di butuhkan 100 Ton (berbentuk portabel 2 x 50) dan Kendaraan Berefrigerasi Roda 6.
- f. Status lahan untuk Gudang Beku Portabel sudah clean and clear.
- g. Lahan untuk garasi Kendaraan Berefrigerasi sudah tersedia.
- h. Jenis ikan yang akan di simpan utamanya adalah bahan baku pindang selain itu juga Ikan Konsumsi ; Ikan kakap termasuk kepala kakap, Ikan tuna, Ikan tongkol. Ikan cakalang, cumi, sotong, udang vaname maupun udang jenis lain, baronang, kuwe, bawal, ikan tilapia. dan jenis ikan lainnya yang akan di distribusikan kepada langganan Hotel, Restoran, Rumah makan, Warteg, Kantin dan perumahan serta penghuni apartemen.
- i. Rencana untuk buffer stock ikan dan ikut berkontribusi dalam kestabilan harga bahan baku ikan saat musim penceklik yang dibutuhkan oleh UMKM pemindangan.

Dokumentasi



Gambar 21. Verifikasi Lapangan Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari

3. Rapat Penyusunan Juknis BP GBP dan KR dalam rangka mendukung KALAMO, tanggal 22 April 2024 di Ruang Branding.

- a. Rapat dipandu oleh Katimja Prasarana Sarana Logistik dan dihadiri oleh Direktur Logistik, APHP Ahli Utama, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Biro Umum dan PBJ, perwakilan dari Sekretariat Ditjen PT, perwakilan Direktorat lingkup PDSPKP serta perwakilan Timja lingkup Dit.Logistik; Dari hasil diskusi kami laporkan sebagai berikut:
- b. Perlunya Juknis KALAMO di tingkat KKP sebagai dasar penyusunan Juknis di lingkup eselon 1. yang dikoordinir oleh Roren KKP;
- c. Petunjuk teknis Penyaluran BP lingkup Ditjen PDSPKP disusun saling bersinergi antar unit eselon 2;

- d. Syarat administrasi dan teknis calon penerima BP agar disederhanakan dengan memperhatikan potensi pemanfaatan;
- e. penyambungan listrik, air dan pembuatan pondasi menjadi tanggungjawab pemberi bantuan.
- f. Kemungkinan pengelolaan dan pemanfaatan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain.

Dokumentasi



Gambar 22. Rapat Penyusunan Juknis BP GBP dan KR

4. Rapat Reviu Desain dan analisa kelayakan usaha, terhadap permohonan masukan rencana pembagnunan Gudang Beku Koperasi Mina Muara Sejahtera Kab. Lebak.

- a. Rapat dipimpin oleh Katimja Prasar Dit.Log dan dihadiri oleh PM Ahli Utama , PM Ahli Madya, APHP Ahli Madya, perwakilan Dit.Sar, Dit.PBM, BBP3KP, Katimja Pemantauan Dit.Log, dan Perwakilan Timja lingkup Dit.Log.
- b. Tujuan Rapat memberikan masukan terkait:
 - Lay out gudang beku;
 - Persyaratan SKP;
 - Analisa usaha ikan layur.
- c. Hasi diskusi sebagai berikut:
 - Lay out memenuhi persyaratan SKP dengan beberapa catatan;
 - 1) Kemiringan lantai mengarah ke saluran air di area basah menuju area handling;
 - 2) Perlu dijelaskan alur drainase dan pembuangan limbah;
 - 3) Ketinggian lantai ruang handling di turunkan sekitar 5 cm;
 - 4) Efektifitas pemanfaatan ruang kosong sebelah ruang alat;
 - 5) Sekat antara Ruang handling dan ruang packing berupa panel 5 cm;
 - 6) Penempatan keran air bersih di ruang handling dan dan receiving.
 - 7) Peralatan steam air untuk kebersihan di area receiving.

- 8) Penempatan insect killer di daerah receiving, keluar masuk karyawan dan anteroom sebelum loading;
 - 9) Ketinggian bangunan utama disesuaikan setinggi referer kontainer;
 - 10) Suhu masing2 ruangan mengacu pada standart yang sudah ditetapkan
- d. Masukan peserta rapat terkait pemsaran hasil perikanan;
 - Pasar domestik ikan layur masih kecil, sedangkan produksi tidak beralangsur sepanjang tahun, Koperasi harus mempunyai bisnis sampingan untuk keberlanjutan operasionalisasi gudang beku;
 - Kapasitas ABF tidak mencukupi saat musim ikan layur;
 - Analisa usaha memerlukan data-data yang lebih rinci.
 - e. Hasil rapat disampaikan kepada koperasi untuk ditindaklanjuti, dan menyarankan Koperasi mengumpulkan data terkait bisnis ikan layur dengan koordinasi dengan Dit.UI.

Dokumentasi



Gambar 23. Rapat Reviu Desain dan analisa kelayakan usaha

3.2.7. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian

tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 10 diatas belum ada capaian pada Triwulan II. Untuk mencapai Indikator Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit) sebesar Rp4.320.000.000,-

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp57.410.387,- atau sebesar 1,33% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Survey Karoseri Box Pendingin PT. Bengawan Karya Sakti di Tangerang – Banten tanggal 15 Mei 2024.

- a. Alamat di Kawasan industri Agarindo No. 168, Pasar Kemis, Cikupa, Tangerang – Banten
- b. Sudah beroperasi selama 15 Tahun, Memiliki pabrik seluas 4 Hektar dengan 10 Production Line
- c. Kapasitas Produksi 200 kendaraan /Bulan
- d. 50 All Purpose Vehicle yang di produksi diantaranya : Dump Truck, Cargo & Box Trucks, Kendaraan Berpendingin, Wing Box Truck, Self - loader, Arm – roll, Crane Truck, Logging Truck, Crude Oil Tank, High Blow Cement Bulk tanker Trucks, Garbage Compactors, Fuel Tanks, Water Tanks, Vacum Tank, Towing Trucks, Fire Fighter Trucks, dan Special Purpose Vehicles Lainnya.
- e. Previous Government Project :
 - Dinas Lingkungan Hidup : bus toilet ASIAN games, arm – roll, dump truck sampah, compactor
 - Kemensos : mobil box dapur umum, mobil tangki air, mobil box serbaguna
 - Polisi : mobil satelit BRIMOB, mobil tahanan

- Kehutanan : mobil slip-on pemadam kebakaran
 - BNPB : mobil box dapur umum, mobil tangki air, mobil box serbaguna
 - Bea Cukai : mobil penerangan
 - Kominfo : mobil satelit
- f. Sudah bekerjasama dengan puluhan Truck Dealer, Contractors, dan End User

Dokumentasi



Gambar 24. Survey Karoseri Box Pendingin di PT. Bengawan Karya Sakti

3.2.8. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 11 diatas belum ada capaian pada Triwulan II Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) sebesar Rp4.320.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.45.546.469,- atau sebesar 1,05% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Survey Karoseri Box Pendingin di CV.Delima Mandiri pada tanggal 3 April 2024.

- a. Alamat di JL. Dreded No. 42 Bogor 16132 Jawa Barat, Indonesia,
- b. Memiliki 2 pabrik perakitan di Bogor (1 ha), dan Sentul (2 ha)
- c. Fasilitas yang di miliki diantaranya : Cutting and Bending Machines, Over Head Crane, Hinges and components production with powder coating, Spray Booth and Oven, Fiberglass Production, Trimming Production, interior production, water leakage test, lathe and milling machines, CNC machines, Plate and frame processing facility.
- d. Kapasitas Produksi mencapai 1.500 kendaraan /Tahun terdiri dari : Kendaraan penumpang, Kendaraan Barang, Kendaraan Berefrigerasi, Kendaraan dengan desain Khusus, dan vip interior desain
- e. Sertifikasi ISO : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Dokumentasi



Gambar 25. Survey Karoseri Box Pendingin di CV. Delima Mandiri

3.2.10 Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) Lembaga. Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 5 lembaga atau 100% terhadap target..

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	3	2	4	10	5	2	4	7	166,67	70	300	100

Berdasarkan tabel 12. diatas, menunjukan bahwa capaian indikator Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga) Capaian pada Triwulan II adalah 5 Lembaga atau 150% lebih tinggi dari capaian di Triwulan I yaitu 2 Lembaga dan sampai dengan Triwulan II capaian sebesar 7 Lembaga atau setara dengan 70% terhadap target tahun 2024. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Twiwulan II tahun 2024 adalah 300% dan 100% terhadap tingkat pertumbuhan pada Triwulan II tahun 2023

Lembaga yang difasilitasi resi gudang Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perumda Karya Lasinrang yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan komoditas rumput laut;
- 2) CV. Anugerah Agung Global yang berdomisili di Kota Palopo dengan komoditas rumput laut;
- 3) PT Ajaib Toha Putra, Kab. Pati, komoditas ikan
- 4) PT Monster Lautan Indonesia, Kab. Pati, komoditas : ikan
- 5) PT Asia Makmur Rejeki, Kab. Pati, komoditas: ikan

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp850.000.000,-.Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp447.217.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.294.007.994,- atau sebesar 34,59% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang di Surabaya

Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang dalam rangka mempercepat akselerasi pembentukan lembaga pengelola gudang SRG dan memfasilitasi penyediaan akses lembaga pembiayaan, dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di Ruang Rapat Nautika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik, dihadiri oleh Katimja Pemantauan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kab. Pasuruan, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo dan Kab. Gresik, Asosiasi AP5I dan APRI dan Pelaku Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah peserta 50 orang.

Materi dalam Sosialisasi diantaranya :

- a. Sistem Resi Gudang sebagai Sarana perdagangan dan pembiayaan oleh Biro Pembina dan Pengembangan SRG dan LPK.
- b. Dukungan bank BJB dalam Sistem Resi Gudang oleh Bank BJB Cabang Surabaya.
- c. Potensi Pelaku Usaha Provinsi Jawa Timur untuk Implementasi Sistem Resi Gudang oleh DKP Provinsi Jawa Timur.
- d. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang didalam dunia perikanan oleh PT Cipta Usaha Agro Niaga.

Setelah pemaparan dari Narasumber, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan hasil sebagai berikut:

- Terkait dengan perizinan pengelola gudang SRG, yang dapat menjadi pengelola gudang harus berbadan hukum (Koperasi, Perusda dan PT). pengajuan sebagai pengelola gudang dapat diajukan melalui OSS dan dapat didampingi oleh Tim Bappebti. Proses pengajuan tersebut tidak memerlukan biaya apapun.
- Selain menyimpan barang yang diresikan (SRG), gudang SRG juga dapat menyimpan barang non SRG, tetapi harus dilaporkan kepada Bappebti
- Barang-barang yang tersimpan di gudang SRG dan yang dapat diresikan bukan milik pengelola gudang, tetapi milik petani. Pemilik barang diharuskan melaporkan ke Bank jika barang yang tersimpan dijual kepada pengelola gudang.
- Uang yang diperoleh dari resi yang diagunkan ke bank dapat digunakan kembali untuk bisnis.
- Beberapa keuntungan sebagai pengelola gudang SRG adalah sebagai berikut:
 - Pengelola Gudang mendapatkan biaya penyimpanan, serta dapat bekerja sama dengan mitra untuk mengelola gudang. Dapat menjadi standby buyer dan selalu mempunyai stok

- Mempunyai jaringan bisnis seluruh Indonesia
- Barang yang sulit terjual di gudang SRG dapat dilelang melalui pasar lelang komoditas
- Barang-barang di gudang SRG dapat menjadi prioritas utama untuk mensuplai kebutuhan pemerintah
- Penurunan mutu barang yang disimpan gudang mempunyai batasan tertentu, oleh karena itu pengelola gudang wajib menjaga dan merawat.

Dalam rangkaian acara sosialisasi tersebut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang PT Anugerah pesona mandiri kepada mitra penyimpan ikan kemudian diserahkan ke Bank BJB untuk proses penjaminan pembiayaan dengan detail informasi Resi Gudang sejumlah 4 resi dengan komoditas ikan layang beku volume total ikan 115.95 ton dengan nilai pembiayaan Rp. 1.998.750.000 (Milyar).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan semakin meningkat minat para pelaku usaha di wilayah Jawa Timur untuk menjadi Lembaga Pengelola Sistem Resi Gudang dalam upaya peningkatan daya saing, sarana pengendalian stok nasional dan inflasi, serta perluasan bisnis di sektor perikanan.

Dokumentasi



Gambar 25. Kegiatan sosialisasi implementasi SRG di Surabaya

2. Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan di Kab. Pati

Pada tanggal 16 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan dalam rangka mempercepat akselerasi pembentukan lembaga pengelola gudang SRG dan memfasilitasi penyediaan akses lembaga pembiayaan. Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik, dihadiri oleh Katimja Pemantauan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kab.Pati, Kab. Rembang, Pelaku Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dan Kab. Rembang dengan jumlah peserta 50 orang.

Materi yang disampaikan dalam Sosialisasi diantaranya :

1. Sistem Resi Gudang sebagai Sarana perdagangan dan pembiayaan oleh Biro Pembina dan Pengembangan SRG dan LPK
2. Dukungan Bank BJB dalam pembiayaan Sistem Resi Gudang oleh Bank BJB Wilayah 5
3. Potensi Pelaku Usaha untuk Implementasi Sistem Resi Gudang oleh DKP Kab. Pati dan Kab. Rembang
4. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang didalam dunia perikanan oleh PT Cipta Usaha Agro Niaga

Beberapa hal yang didiskusikan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang saat ini sedang melakukan pendampingan SKP untuk komoditas ikan kering, dan informasi Bappebti ikan kering dapat diusulkan dalam pembiayaan SRG. Pola usaha ikan kering tidak memiliki standby buyer ketika musim melimpah sehingga tidak dapat terserap oleh pasar. Dinas berharap PT CUAN dapat memperluas jangkauan untuk menyerap produksi ikan kering di Kab. Rembang.
2. Peserta sosialisasi membutuhkan informasi lebih lanjut terkait parameter uji dan pihak yang menilai uji mutu produk yang dapat dilakukan internal perusahaan atau dari eksternal melalui LPK Uji Mutu
3. Skema penghitungan beban bunga oleh bank yang melakukan pembiayaan baik pembiayaan secara subsidi maupun komersil
4. Pengelola gudang dapat bekerjasama dengan penitip barang untuk menjadi standby buyer sehingga jika pengelola gudang membutuhkan bahan baku dapat membeli dari pemilik barang dan diketahui oleh bank. Setelah dilakukan transaksi bahan baku ikan dapat diolah menjadi produk lainnya.

Dengan sosialisasi diharapkan akan semakin meningkat minat para pelaku usaha di wilayah Pati dan Rembang untuk menjadi Lembaga Pengelola Sistem Resi Gudang dalam upaya peningkatan daya saing, sarana pengendalian stok nasional dan inflasi, serta perluasan bisnis di sektor perikanan

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan dalam rangka mendukung logistik ikan antara pelaku usaha kapal pengangkut dan kapal penangkap ikan

Dokumentasi



Gambar 27. Kegiatan sosialisasi implementasi SRG di Pati

3.2.11 Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan.

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu penambahan 5 lembaga atau total target sebanyak 8 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	2	-	-	8	2	-	-	2	100	25	200	200

Berdasarkan tabel 13. diatas, menunjukan bahwa capaian indikator Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga) Capaian pada Triwulan II adalah 2 Lembaga atau setara 100% dari capaian yang di targetkan pada Triwulan II dan sampai dengan Triwulan II capaian sebesar 2 Lembaga atau setara dengan 25% terhadap target tahun 2024. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah 200% dan 200% terhadap tingkat pertumbuhan pada Triwulan II tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar Rp800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp295.523.049,- atau sebesar 36,94% terhadap pagu awal. Pada triwulan II atas target 2 kesepakatan pada Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan sudah tercapai 2 Kesepakatan atau 100%, Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

- 1. Identifikasi Kapal Pengangkut Hasil Perikanan di Pelabuhan Bajomulyo –Juwana Pati dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pelaku Pengadaan Hasil Perikanan**

- a. Telah dilakukan Koordinasi terkait pengelola kapal pengangkut dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
 - Jumlah Kapal Pengangkut yang Memiliki ijin SIKPI 20 Kapal, dengan kepemilikan kapal Perusahaan dan Perorangan.
 - Kendala yang dihadapi adanya kenaikan harga solar dan cuaca yang tidak menentu.
 - Tindak lanjut yang diharapkan :kapal bisa menggunakan harga solar non industri.
 - Kapal angkut yang ada di Pelabuhan Bajomulyo beroperasi di laut lepas, Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Port to Port.
- b. Telah dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pengadaan Hasil Perikanan antara :
 - Kapal Pengangkut Mustika alam 01 dengan Kapal Penangkap Bintang Mas Terang.
 - Kapal Pengangkut Mustika alam 02 dengan Kapal Penangkap Bintang Mas Eklusive.
 - Kapal Penangkap Bintang Mas Terang dengan Kapal Pengangkut Mustika Alam 02.
 - Kapal Penangkap Bintang Mas Eklusive dengan Kapal Pengangkut Mustika Alam 01.
- c. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah :
 - Menjamin keberlangsungan pengadaan ikan, distribusi dan transportasi hasil perikanan berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, keberlanjutan, adil dan saling menguntungkan.
 - Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok ikan.
 - Menerapkan sistem rantai dingin dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dokumentasi



Gambar 28. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kapal Angkut dan Pengadaan Hasil Perikanan

3.2.12 Sasaran Kegiatan Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam rangka peningkatan operasional gudang beku 1000 ton.

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, total target sebanyak 4 unit. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 14. Target dan capaian IK 12

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 14 diatas belum ada capaian Indikator Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit) pada Triwulan II. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik , Untuk mencapai Indikator Kinerja ini dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp2.050.000.000,- yang bersumber dari anggaran PNPB. Belum adanya capaian PNPB lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNPB belum dapat digunakan. Belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

3.2.13 Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Indikator Kinerja Kegiatan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 15. Target dan capaian IK 13

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 15 diatas belum ada capaian Indikator Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit) pada Triwulan II. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp1.434.500.000,- yang bersumber dari anggaran PNPB. Belum adanya capaian PNPB lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNPB belum dapat digunakan. Belum ada realisasi anggaran sd Triwulan II karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

3.2.14 Sasaran Kegiatan Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik. Target indikator tahun 2024 adalah sebesar 1.100 orang.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 adalah sebesar 125 orang atau sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan II, Capaian Triwulan 2 diperoleh dari tenaga kerja yang terlibat pada pelaksanaan indikator kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang, dimana capaiannya 2 Lembaga yang difasilitasi sistem resi gudang.

Tabel 16. Target dan capaian IK 14

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	125	50	-	1100	125	55	-	180	100	16,36	7000	12.500

Berdasarkan tabel 16 diatas capaian Indikator Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang) pada Triwulan II adalah 125 Orang atau setara 100% dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan II, capaian sampai dengan Triwulan II adalah 180 Orang atau setara 10.36% dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan terhadap

realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah 7000% dan 12.500% terhadap realisasi pada Triwulan II tahun 2023.

3.2.15 Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Target PNBP tahun 2024 sebesar 2 miliar berasal dari gudang beku 2000 ton sebagai objek penarikan PNBP.

Tabel 17. Target dan capaian IK 15

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 17 diatas belum ada capaian Indikator Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar) pada Triwulan II dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton dan gudang beku 2000 Ton Muara Baru serta Mobil Refrigerasi yang menjadi objek penarikan

PNBP kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik.

3.2.16 Sasaran Strategis Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 87 sedangkan target semester I adalah sebesar 75. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan 1.

Tabel 18. Target dan capaian IK 16

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	75	-	-	76	87	79,63	-	79,63	106,17	91,53	7.963	63

Berdasarkan tabel 18 diatas pada indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) pada Triwulan II

telah tercapai 87 Indeks setara dengan 106,17% dari target dan 16% lebih tinggi dari target yang ditentukan pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 7.963% dan 63% tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2023.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada semester I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 84. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 19. Target dan capaian IK 17

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Logistik pada Triwulan II antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri kegiatan Workshop Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP di PPN Kejawanan pada tanggal 13 Juni 2024

Kegiatan dibuka oleh Inspektur III, Itjen KKP (Bpk. Wahjudi Poerwanto), dihadiri oleh Katimja Pelaporan Setjen KKP, perwakilan Setditjen PRL, Setditjen PDSPKP, Setditjen PT, Setditjen PB, Setditjen PSDPKP, SetBPPSDM, SetBPPMHP, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP.

- a. Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP
- b. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :
 - Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
- d. Inspektur III Inspektorat Jenderal KKP menyampaikan beberapa Upaya yang diperlukan untuk perbaikan yaitu :
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
 - Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas/anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
 - Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
 - Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan salah satu ukuran tercapainya target atau peningkatan capaian kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 20. Target dan capaian IK 18

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan II antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 21. Target dan capaian IK 19

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase Rekomend	80	80	75	80	88,64	100	97	88,64				

asi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)										110,80	125,00	-11	-8,62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-----	-------

Berdasarkan tabel 21 diatas Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%) pada Triwulan II adalah 88.64% telah tercapai atau 13,64% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan II atau setara 110,80%.Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah -11% dan tingkat pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2023 adalah -8,62%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan II, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Tabel 22. Target dan capaian IK 20

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	100	133,33	141,84	141,84		33,33

Berdasarkan tabel 22 diatas Indikator ini ditargetkan sebesar 94% Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, Capaian pada Triwulan II adalah sebesar 133,33% atau 141,84% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama. angka pertumbuhan terhadap realisasi Triwulan II tahun 2023 adalah 33,33%.

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 23. Target dan capaian IK 21

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan	-	-	-	80	-	-	-	-				

n Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)										-	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan II belum terdapat penilaian.

Tabel 24. Target dan capaian IK 22

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.652.900.000,- dari pagu semula Rp.57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 3.571.877.297,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar 6,20% dari pagu awal dan 7,78% dari pagu setelah AA (**sumber data Sakti SP2D**)

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 Juni 2024

No	Rincian Ouput	Pagu Awal (Rp)	Blokir Automatic Adjustment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu awal (%)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	ABR.004 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.250.000.000	454.000.000	382.519.031	867.480.969	30,60	48,06
2	AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	1.160.000.000	329.900.000	599.695.195	560.304.805	51,70	72,24
3	BDB.001 Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	800.000.000	300.000.000	283.693.963	516.306.037	35,46	56,74
4	BMA.051 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.000.000.000	318.000.000	376.315.276	623.684.724	37,63	55,18
5	QDB.002 Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	850.000.000	447.217.000	306.514.460	543.485.540	36,06	76,10
6	QDB.003 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	340.000.000	325.101.105	674.898.895	32,51	49,26
7	QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP	37.152.000.000	9.384.000.000	932.605.656	36.219.394.344	2,51	3,36
8	QEG.002 Sarana distribusi logistik produk KP	4.320.000.000	-	60.936.012	4.259.063.988	1,41	1,41
9	QEG.006 Mobil refrigerasi (MP korporasi)	4.320.000.000	-	45.546.469	4.274.453.531	1,05	1,05
10	RAL.051 Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.434.500.000	-	-	1.434.500.000	-	-
11	RAN.001 Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.237.500.000	79.783.000	258.950.130	1.978.549.870	11,57	12,00
12	RBQ.003 Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	2.050.000.000	-	-	2.050.000.000	-	-
TOTAL		57.574.000.000	11.652.900.000	3.571.877.297	54.002.122.703	6,20	7,78

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

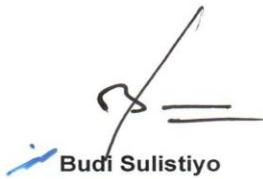
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari April sampai dengan Juni 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 101,76. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 5 Kesepakatan; capaian 5 Kesepakatan atau 100% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 125 Orang; capaian 125 Orang atau 100% dari target;
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target 75 Indeks; capaian 79,63 Indeks atau 106,17% dari target
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 86,64 atau sebesar 110,8% dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 141,84% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4. Lampiran

4.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik

	<p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132 LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id</p>
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT LOGISTIK</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Berny A. Subki Jabatan : Direktur Logistik</p>	
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama.</p>	
<p>Nama : Budi Sulistiyo Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p>	
<p>Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.</p>	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="center">Jakarta, Januari 2024</p>	
<p align="center">Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p>	<p align="center">Pihak Pertama, Direktur Logistik</p>
 <p align="center">Budi Sulistiyo</p>	 <p align="center">Berny A. Subki</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT LOGISTIK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
11.	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	57.574.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024		57.574.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,
Direktur Logistik



Berny A. Subki